

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMOTONGAN TERNAK
DI RUMAH POTONG HEWAN DAN PENGENDALIAN
PEMOTONGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ANWAR

NIM. 500878235

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMOTONGAN TERNAK DI RUMAH POTONG HEWAN DAN PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Anwar

anwarsaja44@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Pelaksanaan program Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada Undang-Undang No. 14 tahun 2014 oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang peternakan dan kesehatan hewan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) No. UKP.1220/328/IV/2017 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan Dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sebab penelitian dilakukan pada kondisi alamiah untuk menemukan, memahami dan mendapatkan deskripsi secara jelas serta mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti. Konsep penelitian ini merupakan kebijakan publik, dimana produk yang diteliti adalah Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan media internet. Kesimpulan dari penelitian ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu; komunikasi, sumberdaya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi semuanya sudah cukup dan terlaksana dengan baik. Sedangkan faktor penghambat kebijakan ini yakni, masih perlu adanya penambahan personil petugas inseminator lapangan guna memaksimalkan kinerja, maupun pelatihan-pelatihan dibidang masing-masing pelaksana. Selain itu kelengkapan prasarana dan sarana di Rumah Potong Hewan perlu ditingkatkan lagi, hal ini dilakukan untuk peningkatan pelayanan bagi peternak di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, pemotongan ternak di rumah potong hewan dan pelarangan pemotongan betina produktif.

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF POLICY IMPLEMENTATION PROGRAM
OF SLAUGHTER LIVESTOCK IN SLAUGHTERHOUSE AND
PROHIBITION OF PRODUCTIVE FEMALE CUTTING IN
REGENCY KOTAWARINGIN BARAT**

Anwar

anwarsaja44@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Implementation of policy implementation program of slaughter livestock in slaughterhouse and prohibition of productive female cutting in regency Kotawaringin Barat, referring to the law number fourteenth years two thousand fourteenth from minister of agriculture by directorate general of animal husbandry and veterinary and standard operating procedures number UKP 1220/328/IV/2017, about slaughtehouse service in regency Kotawaringin Barat. The main objective of this research is description and analysis of policy implementation program of slaughter livestock in slaughterhouse and prohibition of productive female cutting in regency Kotawaringin Barat, and description/analysis factor support and inhibition of implementation of policy implementation program of slaughter livestock in slaughterhouse and prohibition of productive female cutting in regency Kotawaringin Barat. This research using qualitative methode, because this research is done on scientific conditions to discover, understand and get the description clearly and deepy about the problem to be research. The Conclusion from this research consists of two factors is supporting and inhibiting factors. Supporting factors like as: communication, human resources, attitude, and birocration structure goes well. So that each implementation task and clear responsibility and easy to understand the implement, while the inhibiting factor is the need for additional personel of field executor. Besides it needs to be improved infrastructure and facilities in slaughterhouses, for the benefit of folk breeders in regency Kotawaringin Barat.

Keyword: Implementation, Policy, Slaughtering livestock in slaughterhouse and prohibition of productive female slaughter.

**PERSETUJUAN TAPM
PASCA UJIAN SIDANG**

1. Judul : Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat

2. Identitas Peneliti

Nama : ANWAR
 NIM : 500878235
 UPBJJ : Palangkaraya
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Hari/tanggal : Selasa/6 Februari 2018

Menyetujui,

Pembimbing II

Pembimbing I

Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd
 NIP. 195812211983031008

Dr. Syamsuri, M.Si
 NIP. 197905212006041014

Mengetahui

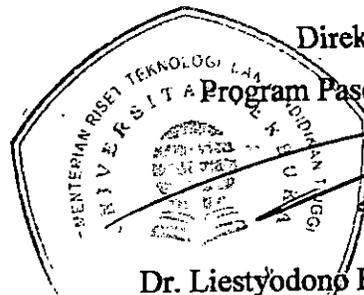
Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik

Program Pasca Sarjana
 Pada Universitas Terbuka

Dr. Darmanto, M.Ed
 NIP.19591027198603 1 003

Direkur

Program Pasca Sarjana



Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si
 NIP.19581215198601 1 009

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

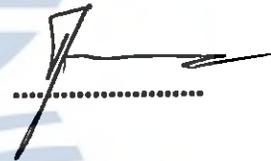
Nama : ANWAR
NIM : 500878235
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong
Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif
Di Kabupaten Kotawaringin Barat

Telah di pertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pasca
Sarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka pada :
Hari/tanggal : Selasa/23 Januari 2018
Waktu : 10.00 – 11.30

Dan Telah Dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

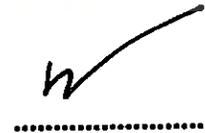
Ketua Komisi Penguji
Dr. Tita Rosita, M. Pd


.....

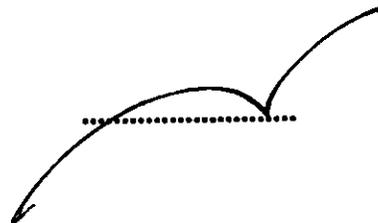
Penguji Ahli
Prof. Dr. Endang Wirjatmi TL, M. Si


.....

Pembimbing I
Dr. Syamsuri M.Si


.....

Pembimbing II
Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd


.....

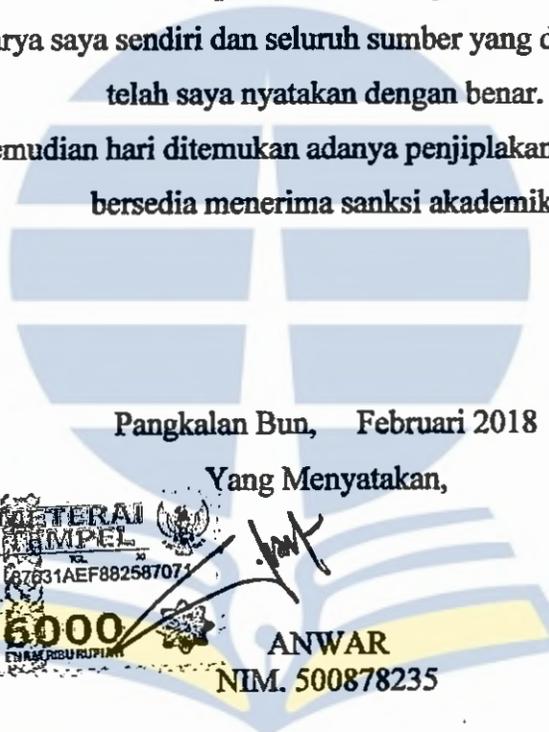
**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

**TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah
Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif
di Kabupaten Kotawaringin Barat**
adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip ataupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya
bersedia menerima sanksi akademik.

Pangkalan Bun, Februari 2018

Yang Menyatakan,



ANWAR
NIM. 500878235

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) dengan judul Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan baik dan lancar.

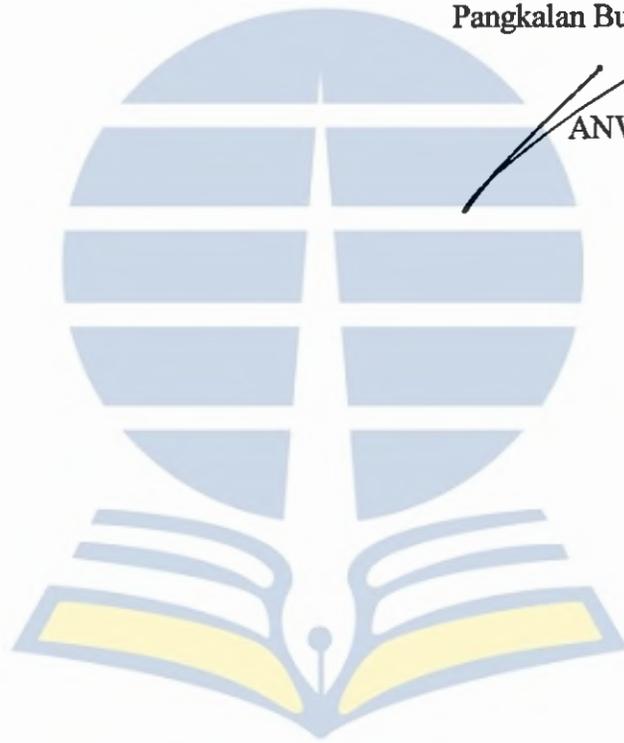
Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Bidang Administrasi Publik Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D, Rektor Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
3. Bapak Dr. Syamsuri, M.Si, pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd, pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan TAPM ini.
4. Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu.
5. Semua sahabat, kolega, rekan dan pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung dan tidak langsung selama penyelesaian penelitian ini.
6. Kedua orangtua, istri dan anak tercinta yang telah mendukung sepenuhnya.

Penulis menyadari bahwa TAPM ini dan dengan keterbatasan yang dimiliki serta terus berkembangnya ilmu pengetahuan maka apabila penelitian ini masih belum sempurna, peneliti dengan rendah hati berterima kasih atas segala saran dan kritik demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Akhir kata semoga Allah Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Pangkalan Bun, Februari 2018

ANWAR S.PKP



RIWAYAT HIDUP

Nama : ANWAR
NIM : 500887235
Tempat/Tanggal Lahir : Mantuil, 08 april 1972
Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN Mantuil pada tahun 1986
Lulus SMP di SMPN 2 Kelua Kota pada tahun 2001
Lulus SMA di SPPM Palangkaraya pada tahun 1992
Lulus D3 di APP Magelang pada tahun 1999
Lulus S1 di Universitas Terbuka pada tahun 2007

Riwayat Pekerjaan : Tahun 1993 s/d 2001 sebagai pelaksana teknis pada cabang Dinas Peternakan Kab. Kotawaringin Barat.
Tahun 2001 s/d 2012 sebagai pelaksana teknis pada seksi perbibitan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kotawaringin Barat.
Tahun 2013 s/d 2016 Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kotawaringin Barat.
Tahun 2017 s/d sekarang Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Usaha Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, Februari 2018

ANWAR
NIM. 500887235

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Persetujuan TAPM Pasca Ujian Sidang	iii
Pengesahan Hasil Ujian Sidang	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Riwayat Hidup.....	vii
Daftar isi.....	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Teori.....	11
1. Teori Kebijakan Publik	11
2. Teori Peran Dalam Organisasi	19
1) Peran Antar Manusia.....	19
2) Peran Informatif	20
3) Peran Pembuat Keputusan.....	21
3. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	23
4. Teori Pembangunan Peternakan.....	28
5. Model-model Implementasi Kebijakan Publik	31
a) Model Edward III	32
B. Kerangka Berpikir	41
C. Operasional Konsep Rumah Potong Hewan	42
D. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	43
BAB III. METODE PENELITIAN	47
A. Desain Penelitian.....	47
B. Sumber Informasi dan Informan Penelitian	48

C. Instrumen Penelitian.....	51
D. Prosedur Pengumpulan Data	51
E. Metode Analisis Data	54
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	58
a. Kondisi Geografis	58
b. Topografi.....	59
c. Geomorfologi	60
d. Iklim	60
e. Demografi.....	60
B. Profil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	61
a. Tugas Pokok.....	62
b. Fungsi	62
a) Kepala Dinas	63
b) Sekretaris.....	64
c) Bidang Prasarana dan Sarana	65
d) Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak.....	66
e) Bidang Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner.....	67
f) Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan	68
C. Hasil Penelitian	70
a. Komunikasi	70
b. Kejelasan (clarity)	74
c. Konsistensi	77
d. Koordinasi	78
e. Sumber Daya.....	84
f. Sika.....	94
g. Transparansi	97
h. Struktur Birokrasi	101
i. Pembahasan Penelitian.....	104
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN.....	121

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1.1 Rangkaian Kegiatan Kebijakan Publik.....	13
2. Gambar 1.2 Alur Proses Implementasi Kebijakan	25
3. Gambar 2.1 Rangkaian Kegiatan Kebijakan Publik.....	12
4. Gambar 2.2 Alur Proses Implementasi Kebijakan	24
5. Gambar 2.3 Variabel Edwar III	34
6. Gambar 2.4 Kerangka Berpikir	41
7. Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif Miles and Hubarman	57



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1.1 Data Pemotongan Ternak di Kabupaten Kobar	8
2. Tabel 1.2 Gambaran Ketersediaan Pangan Protein Hewani (daging) Di Kabupaten Kobar Tahun 2007-2015	9
3. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	44
4. Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	50
5. Tabel 4.1 Luas wilayah perkecamatan di Kabupetn Kobar	59
6. Tabel 4.2 Tinggi Dari Permukaan Laut	60
7. Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	61
8. Tabel 4.4 Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau Dari Faktor Komunikasi dan Koordinasi.....	84
9. Tabel 4.5 Kualifikasi SDM Yang terlibat Dalam Implementasi.....	87
10. Tabel 4.6 Data Angka Tetap Pemotongan sapi dan kerbau tahun 2015 dan Angka Sementara Tahun 2016di Kobar	88
11. Tabel 4.7 Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau Dari Faktor Sumberdaya	93
12. Tabel 4.8 Hasil Analisa Ditinjau Dari Sikap	100
13. Tabel 4.9 Hasil Analisa Ditinjau Dari Struktiur Birokrasi	103
14. Tabel 4.10 Data Pemotongan Ternak Di Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017	108
15. Tabel 4.11 Data Populasi Sapi Potong dan Produksi Daging Tahun 2017 Total populasi sapi potong dan produksi daging Tahun 2016	109



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran 1 Kuisisioner Terhadap Responden Terkait Penelitian	121
2. Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan Penelitian	127



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia sekarang ini mulai sadar akan kebutuhan gizi dalam makanan yang dikonsumsi, terutama gizi yang berasal dari hewani. Tingginya tingkat konsumsi produk olahan peternakan merupakan suatu peluang usaha tersendiri untuk dikembangkan. Bergesernya pola konsumsi masyarakat dalam mengkonsumsi produk olahan peternakan, memerlukan pengawasan produk yang dihasilkan, agar dapat menjamin rasa aman bagi konsumen dan mendorong berkembangnya usaha peternakan.

Menurut Undang-undang No. 7 tahun 1996 Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan dapat disederhanakan dengan menitikberatkan pada 3 dimensi yang berbeda namun saling berkaitan yaitu ketersediaan pangan (produksi), akses pangan oleh rumah tangga (distribusi), dan pemanfaatan pangan oleh individu (konsumsi).

Situasi konsumsi pangan hewani nasional saat ini masih didominasi oleh konsumsi daging yang relatif tinggi, dimana daging merupakan kebutuhan pokok yang paling penting dan sangat diperhatikan oleh pemerintah, baik stok/cadangannya maupun harga pasarnya, dimana pemerintah berperan sangat kuat dalam pengamanan produksi pangan hewani ini.

Maka untuk mengamankan keadaan pangan tersebut yang ditopang jumlah populasi ternak potong yang cukup, salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah yaitu dengan pelaksanaan program Inseminasi Buatan guna memacu angka kelahiran ternak sapi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Ketahanan pangan masih akan menjadi aspek penting di dalam pembangunan di Indonesia dimana bahan pangan merupakan suatu produk yang tidak bisa disubstitusi, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kasus kerawanan pangan di sejumlah daerah yang masih terjadi walaupun secara nasional telah tercapai swasembada, degradasi lingkungan dan perubahan iklim yang menurunkan kapasitas produksi pangan, kompetisi pemanfaatan bahan pangan sebagai sumber energi, serta perkembangan perdagangan regional dan global tidak boleh menjadi sumber utama bagi pemenuhan pangan nasional.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan instansi pemerintah yang mengemban tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang mencakup fungsi perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner. Tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut bukanlah hal yang mudah di tengah tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya golongan usia produktif membutuhkan ketersediaan pangan berbasis hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) menjadi semakin besar;

- 2) Alih fungsi penggunaan lahan pertanian ke non pertanian menjadi faktor pembatas dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, termasuk peternakan;
- 3) Persaingan penggunaan komoditas tidak hanya untuk pangan (*food*), pakan (*feed*) dan energi (*fuel*), misalnya jagung;
- 4) Sentra produsen dan sentra konsumen yang letaknya berjauhan membutuhkan dukungan sarana transportasi dan logistik yang memadai.;
- 5) Sinkronisasi kebijakan pusat–daerah sebagai dampak dari otonomi daerah;
- 6) Liberalisasi perdagangan dunia menimbulkan ancaman membanjirnya produk impor; dan
- 7) Perubahan iklim global.

Di tengah tantangan yang dihadapi tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dan akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi antara lain : Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Revitalisasi Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) dilakukan dalam rangka menjamin daging yang beredar memenuhi kriteria ASUH. Pada tahun 2013 sebanyak telah direvitalisasi RPH-R sebanyak 43 unit di 18 provinsi; atau total 140 unit di 28 provinsi, untuk menjamin keamanan daging selama dalam transportasi, maka pada tahun 2012 telah difasilitasi 12 unit mobil pengangkut daging berpendingin di Prov. Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Jabar, Sulsel, NTB, dan DIY, dan pada tahun 2013 difasilitasi 3 unit untuk Kabupaten Malang, Pacitan, dan Ponorogo.

Tahun 2014 direncanakan akan difasilitasi renovasi RPH-R sebanyak 24 unit dan sarana *cold chain* sebanyak 7 unit dan mobil pengangkut daging berpendingin sebanyak 9 unit. Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat dialokasikan dan telah di bangun RPH Modern Sebanyak 1 (satu) unit.

Pembangunan pertanian pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya sistem agribisnis pertanian dari hulu sampai ke hilir agar memiliki nilai tambah dan daya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, serta perekonomian wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Empat sukses pembangunan pertanian yaitu:

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan nilai tambah daya saing dan ekspor
4. Peningkatan kesejahteraan petani.

Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Tatanan kehidupan mensyaratkan bahwa ketersediaan pangan merupakan kebutuhan yang fundamental. Tanpa pangan, manusia tidak dapat bertahan hidup. Namun demikian, budaya yang berkembang dalam kehidupan manusia

menunjukkan bahwa ada jenis komoditi tertentu yang memang dianggap memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi. Oleh karenanya, tidak seluruh komoditi pertanian perlu untuk dibudidayakan.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menetapkan arah kebijakan jangka menengah pembangunan pertanian ke dalam konsep Nawa Cita kabinetnya. Salah satu arah kebijakan tersebut adalah mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Khusus subsektor peternakan, pemerintah saat ini terus meningkatkan populasi ternak sekaligus penyediaan produksi daging sumber protein. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Muladno mengatakan, sebagian dari arah kebijakan peternakan pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang benar.

Populasi ternak dalam kurun waktu 2010-2014 rata-rata mengalami peningkatan, kecuali kerbau yang menurun sebesar 24,91 persen per tahun. Dalam periode yang sama, untuk peningkatan produksi daging, semua jenis ternak mengalami peningkatan kecuali produksi daging kambing yang menurun 1,60 persen, domba 3,93 persen, produksi susu mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 0,19 persen per tahun, dan produksi telur meningkat rata-rata tujuh persen per tahun.

Dalam periode 2015-2019, salah satu kata kunci program peternakan adalah pemenuhan pangan asal ternak yang mengarah pada peningkatan populasi dan produksi ternak (daging, telur, dan susu). Oleh karena kegiatan utama yang akan diimplementasikan selama 2015-2019 adalah kegiatan produksi bibit ternak,

produksi ternak, dan produksi pakan ternak, Dalam rentang waktu 2014-2015 angka sementara pertumbuhan populasi ternak besar rata-rata mengalami kenaikan. Sapi potong naik 5,21 persen, sapi perah 4,51 persen, dan kerbau 3,46 persen. Sedangkan, pertumbuhan populasi ternak kecil meningkat, antara lain, kambing 1,29 persen dan domba 2,59 persen. Pertumbuhan populasi ternak unggas dan aneka ternak pun rata-rata meningkat, yaitu ayam buras 3,60 persen dan itik 3,55 persen. (Statistik Peternakan. Dirjen PKH, 2015).

Tulang punggung penyediaan daging sapi/kerbau di Indonesia adalah peternakan rakyat. Umumnya, peternakan rakyat adalah peternakan skala kecil dengan kepemilikan dua sampai tiga ekor dan bersifat sebagai usaha sampingan. Guna mendukung peningkatan populasi, produksi, dan produktivitas ternak rakyat maka pemerintah melaksanakan pengendalian pemotongan ternak terutama pelarangan pemotongan terhadap ternak betina produktif. Kendala dalam pengendalian ini yang paling umum terjadi adalah kebutuhan ekonomi masyarakat yang terpaksa menjual ternak betinanya. Sehingga mengakibatkan terjadinya pemotongan ternak betina yang masih produktif yang berakibat berkurangnya populasi ternak.

Kebutuhan daging masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat yang tiap tahun semakin meningkat menuntut adanya peningkatan produksi ternak sebagai basis penghasil daging guna mencukupi kebutuhan lokal masyarakat. Salah satu metode yang digunakan dalam memacu populasi guna peningkatan produksi daging yaitu pengendalian pemotongan ternak betina di Rumah Potong Hewan (RPH).

Dengan rata-rata kebutuhan konsumsi daging nasional sebesar 21,90 kg perkapita pertahun dan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 269.629 jiwa maka konsumsi daging pertahun masyarakat di Kabupaten ini yaitu sebesar 5.904,88 Ton/tahun, namun hasil produksi dihitung dari populasi ternak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat pertahun hanya sebesar 1.081,33 ton/tahun (Laporan Ketahanan Pangan Daerah, 2015). Hal ini terlihat terjadi selisih antara kemampuan peternak memproduksi sapi/daging dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 4.823,55 ton pertahun, sehingga terlihat bahwa kemampuan petani/peternak lokal dalam mencukupi kebutuhan daging di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya sebesar 18-20 % dari kebutuhan yang ada. Untuk menanggulangi kerawanan pangan ini memang dalam jangka pendek dapat ditanggulangi dengan melakukan diversifikasi pemenuhan bahan pangan dari produk perikanan serta melakukan pemasukan daging impor (karena secara nasional negara kita kekurangan daging) atau mendatangkan ternak dari daerah lain (daerah yang surplus ternak) sehingga pemenuhan kebutuhan pangan daerah dapat tercukupi. Akan tetapi untuk program jangka panjang, pemerintah daerah diperlukan adanya terobosan untuk melakukan penanggulangan kerawanan pangan ini melalui program-program yang mendukung swasembada pangan, salah satunya yaitu Pengendalian Pengendalian Pemotongan Ternak betina produktif.

Berdasarkan Data Pemotongan ternak untuk wilayah kabupaten Kotawaringin Barat masih banyak pemotongan ternak yang dilakukan diluar Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai gambaran pemotongan ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Data Pemotongan Ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Pemotongan Ternak (Ekor) Tahun 2015		JUMLAH 2015	Pemotongan Ternak (Ekor) Tahun 2016		JUMLAH 2016	Ket.
	SAPI	KERBAU		SAPI	KERBAU		
1.	3.428	0	3.428	1.676	0	1.676	Tidak Tercatat
2.	807	0	807	2.076	0	2.076	Tercatat
	4.235	0	4.235	3.752	0	3.752	

*) Sumber Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Kotawaringin Barat, 2016

Untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat diperlukan adanya penambahan populasi ternak terutama sapi untuk produksi daging minimal sebanyak 30.000 ekor indukan produktif guna mencukupi kebutuhan daging masyarakat. Sebagai ilustrasi perbandingan kecukupan daging di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan produksi tahun 2007 – 2015 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2. Gambaran Ketersediaan Pangan Protein Hewani (Daging) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 – 2015

No	TAHUN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Daging (Ton)	Produksi Daging (Ton)	Kelebihan/ Kekurangan Daging Per Tahun (Ton)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	2007	223.441	2.301,30	1.287,80	(913,50)	Devisit
2	2008	227.383	2.342,04	1.429,30	(912,74)	Devisit
3	2009	230.984	2.665,30	1.562,46	(1.102,84)	Devisit
4	2010	235.274	5.152,50	1.524,94	(3.627,56)	Devisit
5	2011	245.762	5.382,19	1.634,09	(3.748,10)	Devisit
6	2012	245.762	5.382,19	1.707,27	(3.674,92)	Devisit
7	2013	251.050	5.497,99	1.708,27	(3.789,72)	Devisit
8	2014	261.200	5.720,28	1.897,66	(3.822,62)	Devisit
9	2015	269.629	5.904,88	1.082,33	(4.823,55)	Devisit

*) Kebutuhan Daging Konsumsi Penduduk Per tahun didapat dari Jumlah Penduduk (3) X Kebutuhan Daging Perkapita Per Tahun (21,90 kg/kapita/tahun atau 0,0219 ton/kapita/tahun)

***) Laporan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015

Penjaminan mutu kualitas daging dan Penanggulangan pemotongan betina produktif melalui pengawasan pemotongan ternak di RPH sangat penting untuk

mendukung pemantapan ketahanan pangan. Pemantauan pemotongan ternak di RPH merupakan kegiatan yang sangat perlu diperhatikan mengingat banyaknya perdagangan daging yang tidak ASUH dan pemotongan ternak sapi betina yang masih produktif. Oleh karena itu pelaksanaan pemotongan ternak di RPH perlu kesiapan dari SDM petugas RPH, sarana prasara RPH dan pengguna RPH itu sendiri.

Namun pada hasil pelaksanaan kegiatan program tersebut ditemukan permasalahan yaitu masih kurangnya SDM yang menangani, sarana prasarana dan pemahaman pengguna RPH yang mendukung terlaksananya implementasi kebijakan tersebut, yang terlihat dengan cara perlakuan terhadap ternak yang akan dipotong maupun pelaksanaan pemotongan ternak itu sendiri sehingga menyulitkan petugas dalam pengawasan pemotongan. Faktor lain adalah rendahnya pengetahuan dari para pelaku pemotongan ternak itu sendiri sehingga implementasi pemotongan ternak di RPH belum optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas dan dari hasil pengamatan, maka perumusan masalah yang dihadapi adalah :

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh penjelasan tentang:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai studi literatur bagi semua pihak yang membutuhkan informasi terkait penelitian ini dan sebagai masukan/input bagaimana pelaksanaan Pemotongan di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif dari data yang telah diperoleh. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu agar memberikan masukan/input kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap pelaksanaan Pemotongan ternak di RPH dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif serta dapat memberikan kontribusi yang positif guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan manfaat akademik dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, memperkaya konsep dan teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas, R. Dye, dalam Dwi Nurani (2009) mendefinisikan "*what government to do, what they do it and what difference it makes*". Sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Sementara menurut (Harold Laswell dan Abraham Kaplan, 1970:71) dalam Dwi Nurani (2009) Kebijakan Publik didefinisikan menjadi "*a program of goals, values and practices*" yaitu sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu. Banyak para ahli mendefinisikan Kebijakan Publik, definisi tersebut semuanya benar dan saling melengkapi.

Proses pembuatan kebijakan publik berlangsung dalam suatu lingkungan sosial politik dan kelembagaan dengan unsur yang kompleks, subjek dan objek yang berbeda-beda, latar belakang yang bervariasi dan dengan kepentingan serta motif yang majemuk. Hal ini menurut Mustopadidajaja, (2003) bisa terjadi karena proses pembuatan kebijakan publik bukanlah semata-mata kegiatan teknis-teknokratis tetapi juga kegiatan sosiopolitis yang dinamis dan berlangsungnya dalam sistem kelembagaan yang kompleks.

Menurut Howlet dan Ramsesh, (1995), menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi Kebijakan (*policy formulatiao*n), yakni proses perumusan pilihan pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan Kebijakan (*decisioan making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan.
- d. Implementasi Kebijakan (*policy implementation*), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Menurut Mustopadidajaja (2003), dari sudut manajemen proses pembuatan kebijakan dapat dipandang merupakan rangkaian kegiatan meliputi paling tidak kelompok kegiatan utama, yaitu (1) formulasi kegiatan, (2) pelaksanaan kebijakan, (3) evaluasi kebijakan, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Rangkaian Kegiatan Kebijakan Publik
Sumber : Mustopadidajaja,(2003)

Analisis kebijakan publik adalah kajian ilmu sosial terapan yang mempunyai tujuan memberikan rekomendasi kepada public policy maker dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Dunn (1988) mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Analisis kebijakan bukanlah sebuah keputusan, sebagaimana dikemukakan oleh Weimer dan Vining, 1998-1: *The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision.* Jadi, analisis kebijakan publik lebih merupakan nasihat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin dapat diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Analisis kebijakan publik berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa atau seluruh tahap dari proses kebijakan tergantung pada tipe masalah yang

dihadapi klien yang dibantunya. Analisis kebijakan dilakukan tanpa mempunyai pretensi untuk menyetujui atau menolak kebijakan.

Dunn (1998) mengemukakan bahwa hubungan antara informasi kebijakan dengan metode analisis kebijakan memberi landasan untuk membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu: (1) Analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan di sini merupakan suatu alat untuk menyintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan; (2) Analisis kebijakan retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini, yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan (3) Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan prospektif, tetapi juga menuntut para analisis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Laswell dalam Dunn (1998) menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut betapa pun tetap tidak lengkap, kecuali jika hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analisis berkewajiban melayaninya. Hanya jika pengetahuan tentang kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota- anggota badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan dalam keputusan- keputusan publik, dapat menggunakan hasil- hasil analisis kebijakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya. Oleh karena efektivitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap stok pengetahuan yang tersedia, komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktik dan teori pembuatan kebijakan publik.

Badjuri dan Yuwono (2002) mengemukakan lima argumen tentang arti penting analisis kebijakan publik, yakni

1. Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang ilmiah, rasional dan objektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebijakan publik. Ini artinya bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan pertimbangan ilmiah yang rasional dan objektif bukan semata- mata pertimbangan sempit, mialnya pertimbangan untuk mengamankan kepentingan politik tertentu. Kondisi ini menjadi persoalan berat di Indonesia oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa aspek politik sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik baik di

- pemerintah pusat maupun daerah.
2. Analisis kebijakan publik yang baik dan komprehensif memungkinkan sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam rangka merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (*public welfare*). Hal ini karena analisis kebijakan harus mendasarkan diri pada visi dan misi yang jelas, yaitu mengatur sebuah persoalan agar tercipta tertib sosial menuju masyarakat yang sejahtera.
 3. Analisis kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan bersifat multidimensional, saling terkait (*interdependent*) dan berkorelasi satu dengan lainnya. Oleh karena kenyataan ini maka pihak analis kebijakan mestinya berupa sebuah tim yang multidisiplin yang meliputi berbagai bidang keahlian (*expertise*).
 4. Analisis kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini disebabkan analisis kebijakan juga mencakup dua hal pokok, yaitu hal-hal yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal strategik yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang.
 5. Analisis kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode analisis kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat ini dapat diperoleh dari berbagai mekanisme, seperti melalui konsultasi publik, debat publik, curah pikir bersama berbagai pihak terkait (*stakeholders*), delibrasi publik.

Analisis kebijakan akan sangat membantu menghindari suatu kebijakan yang hanya memakai pertimbangan sempit semata atau pertimbangan kekuasaan semata. Sebagaimana diketahui pertimbangan yang ilmiah dan rasional serta objektif dalam rangka pembuatan kebijakan publik kadang sulit diperoleh karena kenyataan menunjukkan bahwa aspek politik sangat mewarnai pembuatan kebijakan publik baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dengan analisis kebijakan diharapkan dapat menghindari keadaan ini karena analisis kebijakan memberikan informasi dan argumen yang lebih komprehensif dan dapat diterima masyarakat.

Analisis kebijakan publik menghadapi suatu permasalahan yang sifatnya kompleks sehingga membutuhkan sebuah cara tertentu untuk menyederhanakan sesuatu yang kompleks tersebut. Apalagi mengingat tugas analisis kebijakan adalah menginformasikan segala fakta yang dibutuhkan untuk memperkuat hasil analisis sehingga dapat memberikan argumentasi yang lengkap atas alternatif kebijakan yang dihasilkan.

Model adalah alat atau cara untuk menyederhanakan sesuatu yang kompleks tersebut sehingga dengan model tersebut analisis dalam melaksanakan pekerjaannya menjadi lebih fokus dan sistematis. Inti dari setiap analisis kebijakan adalah pembentukan suatu proses yang dapat diatur, padat dan jelas, yang dirancang untuk menghasilkan informasi tentang serangkaian tindakan yang diajukan. Proses ini diberikan oleh satu model atau lebih, oleh alat-alat yang beragam tidak sekedar imajinasi tentang situasi di benak analis saja, tetapi sampai dengan suatu simulasi yang melibatkan beberapa orang ataupun simulasi dalam program komputer.

Dikatakan oleh Dunn (2000) bahwa model kebijakan (Policy models) adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan- tujuan tertentu. Persis seperti masalah-masalah kebijakan yang merupakan bangunan mental yang didasarkan pada konseptualisasi dan spesifikasi elemen- elemen kondisi masalah, model- model kebijakan merupakan rekontruksi artifisial dari realitas dalam wilayah yang merentang dari energi dan lingkungan sampai kemiskinan, kesejahteraan dan kejahatan.

Model kebijakan dapat dinyatakan dalam bentuk konsep, diagram, grafik atau persamaan matematika. Ini semua digunakan tidak hanya untuk menerangkan, menjelaskan dan memprediksikan elemen- elemen suatu kondisi masalah melainkan juga untuk memperbaikinya dengan merekomendasikan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah- masalah tersebut.

Quade (1994) mengemukakan bahwa suatu model merupakan suatu pengganti dari kenyataan; wakil realita yang diharapkan memadai untuk masalah yang sedang dihadapi. Model tersebut terbuat/terbentuk dari faktor-faktor yang relevan dengan situasi tertentu dan yang relevan dengan hubungan-hubungan diantaranya.

Pada kenyataannya, analisis kebijakan publik dapat lebih mudah menyampaikan argumentasi kebijakan yang diusulkan kepada decision maker dengan pemakaian model kebijakan. Model adalah penting untuk analisis kebijakan publik meskipun kita tidak dapat memperkirakan akibat dengan adanya model ilmiah yang terbaik, model kebijakan memberi tahu pada kita tentang apa saja yang mungkin, yang didasarkan pada berbagai asumsi tentang

faktor- faktor masalah, dan dengan demikian menghasilkan informasi yang membantu kita untuk memahami situasi dengan lebih jelas.

2. Teori Peran dalam Organisasi

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Definisi Peran Manajemen Menurut Henry Mintzberg adalah :

1) Peran Antar Manusia/ Peran Interpersonal : peran hubungan personal.

Tiga jenis peran yang langsung mengalir dari kewenangan formal adalah peran antar manusia, yang terdiri atas :

- a) Peran selaku tokoh; karena posisinya selaku kepala dalam organisasi, setiap pemimpin mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan yang bersifat seremonial. Misalnya, seorang Walikota kadang-kadang harus menggunting pita dalam acara pembukaan sebuah kompleks Real estate, seorang Komandan menyematkan tanda jasa kepada bawahannya, dan lain-lain.
- b) Peran selaku pemimpin; karena jabatannya, pemimpin bertanggungjawab atas segala sesuatu yang dikerjakan anak buahnya. Inilah yang disebut perannya selaku pemimpin. Pemimpin misalnya bertanggungjawab atas penggajian dan latihan kerja anak buahnya. Selain itu merupakan tugasnya

yang tidak langsung untuk memotivasi dan meningkatkan semangat kerja anak buahnya. Ia harus berusaha menyelaraskan kebutuhan anak buahnya dengan kepentingan organisasi. Secara formal, organisasi hanya menyediakan sejumlah kewenangan, namun kepemimpinanlah yang menentukan sejauh mana kekuasaan yang tersedia akan dimanfaatkan.

- c) Peran selaku penghubung (liaison); yang dimaksud dengan peran selaku penghubung, adalah kegiatan pemimpin untuk melakukan hubungan selain hubungan ke atas menurut jalur komando. Berdasarkan penelitian, ternyata 45% hubungan yang dilakukan pemimpin adalah hubungan dengan teman sejawatnya, sekitar 45% dengan anak buahnya, dan hanya sekitar 7% saja dengan atasannya. Hubungan dengan teman sejawatnya (misalnya antar kepala bagian) dilakukan dengan cara informal, pribadi dan lisan, tetapi informasi yang terkumpulkan ternyata sangat efektif.

2) Peran Informatif

Mengalir dari peran hubungan antar manusia yang dimainkannya, baik dengan anak buah maupun dengan jaringan kerja yang dihadapinya, pemimpin dapat diibaratkan sebagai pusat syaraf organisasi. Ia tidak perlu mengetahui segalanya, tetapi ia pasti lebih mengetahui dari setiap anggota stafnya. Hal ini dapat dipahami karena selaku orang yang memiliki wewenang formal, ia memiliki akses yang memudahkan untuk mengadakan hubungan baik dengan anak buahnya, maupun dengan pihak ketiga. Peran informatif ini terdiri atas :

- a) Peran selaku pencatat (monitor); karena jaringan kontak pribadinya demikian luas, pemimpin dapat mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Informasi itu didapatnya secara langsung, termasuk yang berupa

desas-desus, kabar angin atau spekulasi. Informasi ini dapat berupa informasi lunak yang berguna bagi kepentingan organisasi.

- b) Peran selaku penyebar (disseminator); Informasi yang berhasil dididapkannya berdasarkan hubungan pribadinya, boleh jadi ada yang perlu diketahui oleh anak buahnya. Pemimpin dapat memberikan informasi yang diperlukan itu secara langsung. Mungkin pemimpin menjadi penghubung antara anak buah yang saling menguntungkan, jika diantara mereka secara formal tidak ada jalur informasi satu sama lain.
- c) Peran selaku juru bicara; peran ini adalah kegiatan pemimpin untuk memberikan keterangan tentang organisasinya kepada pihak luar. Misalnya seorang direktur perusahaan besar harus menggunakan sebagian besar waktunya untuk memberikan keterangan tentang perusahaannya kepada para wartawan.

3) Peran Pembuat Keputusan / Peran Decisional

Informasi tentu saja bukan akhir dari segala kegiatan. Informasi merupakan masukan dasar untuk membuat keputusan. Pemimpin memainkan peran utama dalam proses pembuatan keputusan. Karena wewenang dan kedudukan formalnya sebagai pusat syaraf organisasi, hanya dialah yang bisa mengambil keputusan yang bersifat strategis. Peran pemimpin dalam membuat keputusan terdiri dari :

- a) Peran selaku wiraswastawan (entrepreneur); pemimpin bertanggung jawab untuk memajukan dan menyesuaikan organisasinya dengan perkembangan lingkungan. Perannya selaku pengumpul informasi, suatu ketika mungkin menemukan gagasan-gagasan baru. Gagasan-gagasan baru ini

kalau dianggap baik, dapat diterapkan di dalam organisasi yang dipimpinya.

- b) Peran selaku penanggulang gangguan; tidak ada suatu organisasi pun yang selalu berjalan mulus. Suatu saat pasti akan mengalami gangguan tertentu yang disebabkan perkembangan keadaan. Gangguan itu bukan saja disebabkan keterbatasan pemimpin untuk mengenali situasi, tetapi juga karena pemimpin yang terbaik pun tidak mungkin meramalkan akibat dari seluruh tindakannya. Pendek kata gangguan itu datang dari suatu hal yang diluar jangkauannya. Selaku pemimpin ia harus mampu mengatasinya. Jika perannya selaku wisawastawan berupa inisiatif untuk mengadakan perubahan dengan sukarela, perannya selaku penanggulang gangguan merupakan sebarusnya yang mesti dilakukan.
- c) Peran selaku pembagi sumberdaya; peran ini adalah tanggungjawab pemimpin untuk menentukan "siapa akan dapat apa" dalam organisasi yang dipimpinya. Sumberdaya yang paling penting untuk diatur pembagiannya adalah waktu yang dimilikinya. Selanjutnya pemimpin dibebani tugas untuk mengatur pola hubungan formal yang mengatur bagaimana pekerjaan dibagi dan dikoordinasikan.
- d) Peran selaku perunding; penelitian membuktikan bahwa pemimpin menggunakan waktunya yang tidak sedikit untuk mengadakan perjanjian demi perjanjian. Penutupan perjanjian ini nampaknya telah merupakan tugasnya yang rutin, yang mengalir dari kedudukannya sebagai pusat syaraf organisasi dan kewenangan yang dimilikinya dalam organisasi.

Kesepuluh peran pemimpin tersebut merupakan suatu keterpaduan yang

tidak mudah dipisahkan satu sama lainnya. Tidak ada satu peran pun yang bisa berdiri sendiri.

3. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Dimana didalam implementasi kebijakan aktor, organisasi, prosedur dan teknik dipakai secara bersama dan simultan.

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminta,1970:327). Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian ini sesuai dengan Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai dengan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk

positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan atau tidak dilaksanakan atau di implementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn dalam (Abdul Wahab, 1997:65) menyatakan bahwa proses implementasi adalah “ those action by public or private individuals groups that are directed the achivement of objectives set forth in prior decision ” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono, 1994:137). Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan tersebut. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara sistematis seperti sebagai berikut :



Gambar 2.2. Alur proses implemetasi kebijakan
Sumber: (Bambang Sunggono, 1994 :139)

Dari skema diatas terlihat bahwa proses implementasi dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan segera atau disebut sebagai “ policy performance”. Secara konkrit antara lain dapat kita lihat jumlah dan isi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan

warga masyarakat, misalnya. Perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut sebagai "policy outcome" atau "policy impact". Dengan sendirinya di dalam hasil akhir kebijakan, Kebijakan termasuk juga hasil-hasil sampingan disamping "policy performance" yang di peroleh, (Dwi Nurani, 2009).

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1) implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu : komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi (Edward III, 1980:1). Keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

Menurut Thomas R. Dye dalam Suwitri (2012), mengemukakan kebijakan publik sebagai apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu apa pun merupakan suatu kebijakan publik karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak

yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat.

Senada dengan pandangan Dye adalah George C Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2012) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah. Dari sudut pandang terhadap pengertian kebijakan publik, tampaklah bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Menurut Thomas R Dye dalam Suwitri (2012), hal ini disebabkan oleh 3 hal dari kewenangan yang dimiliki pemerintah, yaitu berikut ini:

1. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).
2. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi dan mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*)
3. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan- badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Jadi kebijakan publik itu muncul dari serangkaian tindakan yang secara definitif itu berkaitan dengan tujuan yang dikehendaki. Pengertiannya adalah kebijakan publik itu tidak timbul secara mendadak, jadi melalui proses yang berkaitan dengan tujuan kebijakan. Kebijakan publik merupakan rangkaian tahapan- tahapan proses dan akan mempengaruhi proses tahapan- tahapan lainnya.

Proses kebijakan publik tersebut melewati empat tahap rangkaian tindakan pemerintah. Yang pertama tahap persepsi/definisi agregasi, organisasi, representasi dan penyusunan agenda, yang merupakan tindakan- tindakan yang membawa permasalahan kepada pemerintah. Kedua, tahap formulasi, legitimasi, dan penganggaran. Yang dasarnya merupakan suatu tindakan langsung pemerintah untuk mengembangkan dan mendanakan program. Ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan ini adalah sebagai tindakan pemerintah untuk kembali pada permasalahan. Keempat, tahap evaluasi dan penyesuaian/ terminasi ini dasarnya adalah kembalinya program kepada pemerintah untuk dilakukan peninjauan kembali atau perubahan- perubahan bilamana diperlukan.

Tahap implementasi merupakan tahap terpenting karena diwaktu pelaksanaan kebijakan sering timbul masalah- masalah besar yang membatasi efektivitas kebijakan.

Dalam melaksanakan roda pemerintahan tentunya ada kebijakan alternatif. Alternatif kebijakan tidak dibatasi pada satu orang atau satu kelompok sebagai pelakunya. Untuk itu kemungkinan akan ada dua atau lebih kelompok yang

merumuskan alternatif kebijakan yang saling bersaing untuk memberikan usulan. Persaingan tersebut membawa resiko ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang kalah. Maka dari itu peran analisis alternatif kebijakan sebagai subsistem kebijakan merupakan sistem politik yang juga merupakan keseluruhan sistem kelompok kepentingan (Sawitri, 2010).

Menurut R.A.W. Rhodes dalam Sawitri (2010), interaksi antara sejumlah departemen dan organisasi pemerintah dengan organisasi pemerintah dengan organisasi masyarakat merupakan *policy network* yang bersifat instrumental dalam proses kebijakan publik. Kekuatan *policy network* atau jaringan kebijakan tergantung pada tingkat integrasi, kemampuan keanggotaan, sumberdaya dan hubungan baik antar jaringan kebijakan dengan publik.

4. Teori Pembangunan Peternakan

Pembangunan peternakan bertujuan untuk meningkatkan konsumsi protein asal ternak, pendapatan petani, devisa negara, lapangan kerja dan pelestarian sumber daya alam. Pembangunan peternakan terutama ditujukan untuk meningkatkan jumlah ternak sehingga mampu menyediakan protein asal ternak untuk kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain.

Populasi yang tinggi dibentuk dari keberhasilan reproduksi. Apabila reproduksi seekor ternak itu bagus, maka ternak akan mampu memproduksi secara maksimal. Peningkatan produksi dapat dilakukan melalui pendekatan kuantitatif yaitu meningkatkan produktivitas atau dengan peningkatan mutu genetik. Peningkatan mutu genetik dapat dilakukan dengan persilangan dan peningkatan reproduksi dapat dilakukan melalui program IB. Inseminasi buatan merupakan satu alat ampuh yang pernah diciptakan manusia untuk peningkatan populasi dan

produksi ternak secara kuantitatif dan kualitatif (Toelihere,1981).

Dengan makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Inovasi percepatan peningkatan populasi ternak melalui program pemotongan ternak di RPH dan Pelarangan pemotongan ternak di RPH yang merupakan salah satu program pemerintah guna terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat pada tataran di lapangan masih banyaknya terdapat kendala, di Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri hal yang paling pokok adalah mengenai sosialisasi program, keandalan petugas, cakupan wilayah sebaran yang luas faktor kepemilikan ternak, serta kemampuan masyarakat/pelaku usaha dalam menerima inovasi teknologi baru, serta keberlanjutan pelaksanaan pemotongan ternak di RPH dan pengendalian pemotongan betina produktif yang telah diprogram tersebut untuk bisa dilaksanakan sehingga dapat menjamin produk asal Hewan yang asuh dan dapat meningkatkan populasi ternak.

Kebutuhan daging sapi di Indonesia cenderung meningkat, namun laju peningkatan produksi dalam lebih lambat dibandingkan dengan permintaan sehingga Indonesia harus mengimpor daging dalam jumlah yang semakin besar Diperkirakan konsumsi daging sapi penduduk Indonesia pada tahun 2020 akan meningkat 2-3 kali lipat dari rata-rata konsumsi saat ini yang kurang dari 2 kg/kapita/tahun, sehingga Indonesia dikhawatirkan akan menjadi importir sapi bakalan terbesar di dunia (Dwiyanto 2008). Tanpa upaya serius, maka pada tahun 2015 hampir 55% konsumsi daging masyarakat akan dipenuhi dari sapi bakalan

dan daging impor, padahal Indonesia memiliki potensi ternak lokal yang cukup besar yang dikelola oleh 4,6 juta rumah tangga. Sensus ternak terakhir tahun 2011 menunjukkan bahwa populasi sapi potong mencapai 14,82 juta ekor (PSPK, 2011), melebihi dari yang diperkirakan. Potensi tersebut harus diberdayakan untuk mengurangi ketergantungan pada sapi impor.

Distanak (2014) melaporkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat diorientasikan kepada upaya pemenuhan target pemotongan minimal sekitar 10 Sampai dengan 14 ekor perhari, sehingga kondisi ketahanan pangan khususnya sapi dapat diperoleh apabila dapat memotong sebanyak $10 \text{ ekor} \times 365 \text{ hari} \times 90 \% = 3.285 \text{ ekor}$ pertahun sampai dengan 3.300 ekor pertahun. Memperhatikan tingginya permintaan daging konsumsi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, maka diperlukan langkah strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan ternak sapi potong. Salah satu upaya yang gencar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui dinas terkait adalah Pelarangan Pemotongan ternak di luar RPH dan pelarangan Pemotongan Ternak Betina Produktif.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan lebih fokus mengembangkan peternakan sapi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di daerah, sebab selama ini masih mengandalkan pasokan ternak sapi dari luar daerah. Kotawaringin Barat merupakan wilayah pertanian yang cocok untuk mengembangkan populasi ternak baik dengan cara pengendalian pemotongan ternak betina produktif di RPH. Upaya pengembangan ternak sapi secara terencana dalam rangka mengatasi kelangkaan daging sapi serta mengurangi ketergantungan pasokan ternak dari luar daerah Kurangnya populasi sapi lokal

akan berdampak sistemik seperti ketersediaan stok dan ketidakstabilan harga daging di pasar.

5. Model- Model Implementasi Kebijakan Publik

Model adalah abstraksi dari realita yang ada. Mustopadijaya dalam Sawitri (2010) merumuskan model adalah penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi, diwujudkan dalam hubungan-hubungan kausal atau fungsional. Model dapat digambarkan dalam bentuk skematik model (seperti flowchart dan arrow diagram), fisika model (seperti miniature), game model (seperti latihan kepemimpinan, latihan manajemen), simbolik model (seperti ekonometrika dan program komputer).

Para penulis studi implementasi pun memiliki keragaman tanggapan atas kekompleksan variabel yang terlibat di dalamnya. Ada penulis yang cukup berani menyederhanakannya dengan mengurangi variabel variabel tersebut, namun ada pula yang mencoba mengembangkan model studi implementasi dengan memperhitungkan seluruh variabel yang teridentifikasi dalam studi mereka. Oleh karenanya dalam Studi Implementasi pretensi untuk mengembangkan suatu teori implementasi yang bersifat umum (Grand Theory) yang dapat berlaku untuk semua kasus di semua tempat dan waktu hampir mustahil dicapai, karena yang dikembangkan tak lebih hanya akan menjadi teori "tindakan" atau teori "melaksanakan" bukan teori Implementasi Kebijakan.

Secara umum yang membuat perbedaan pendekatan dalam teori Implementasi ini berkaitan dengan :

1. Keragaman isu-isu kebijakan, atau jenis kebijakan. Isu atau jenis kebijakan

yang berbeda menghendaki perbedaan pendekatan pula, karena ada jenis kebijakan yang sejak awal diformulasikan sudah rumit karena melibatkan banyak faktor dan banyak aktor, dan ada pula yang relatif mudah. Kebijakan yang cakupannya luas dan menghendaki perubahan yang relatif besar tentu cara implementasi dan tingkat kesulitannya akan berbeda dengan kebijakan yang lebih sederhana.

2. Keragaman konteks kelembagaan, yang bisa meluas menyangkut pertanyaan sejauhmana generalisasi dapat diterapkan pada sistem politik dan konteks negara yang berbeda. Kebijakan yang sama dapat diimplementasikan dengan cara yang berbeda bergantung pada sistem politik serta kemampuan sistem administrasi negara yang bersangkutan.

Merencanakan suatu kebijakan publik ini akan lebih mudah apabila menggunakan model. Karena dengan model penggambaran secara abstrak dari realita rencana kebijakan publik tergambar. Sebab kebijakan publik juga akan lebih mudah dimengerti ataupun dipelajari dengan bantuan menggunakan model. Model adalah merupakan alat bantu dalam perumusan dan pembuatan kebijakan publik. Adapun manfaat dari penggunaan model adalah mempermudah deskripsi persoalan secara struktural. Artinya dapat membantu dalam melakukan prediksi akibat- akibat yang timbul dari perubahan- perubahan karena adanya faktor penyebab. Ada beberapa model implementasi kebijakan, diantaranya:

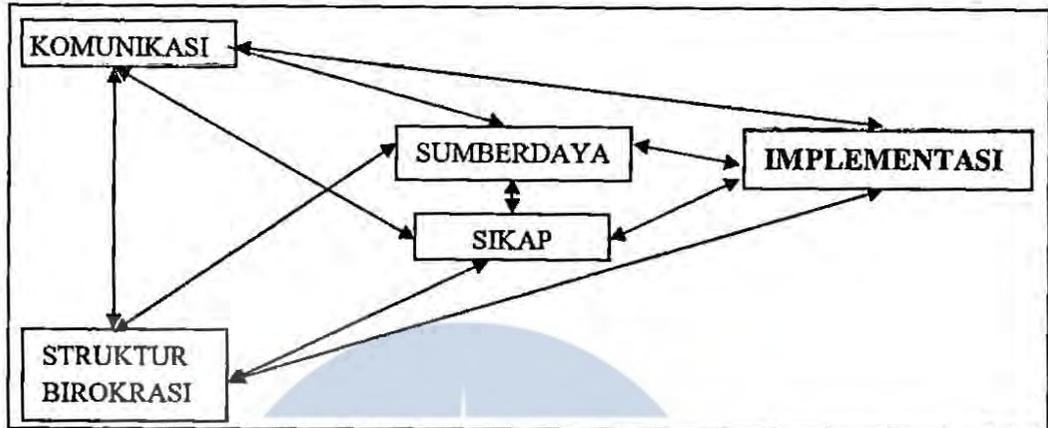
a. Model Edward III

Dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* yang diterbitkan tahun 1980, Edwards III menyatakan bahwa proses implementasi sebagai : "*the state of policy making between the establishment of a policy (such*

as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule) and the consequences of the policy for the people whom it effect." (Edwards, 1980 : 1)

Implementasi menurut Edwards, diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (output, outcome). Yang termasuk aktivitas implementasi menurutnya adalah perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi dan lain-lain. Pada penelitian ini, untuk menganalisis implementasi program ini, peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Menurut Edwards III (1980) dalam Winarno (2002), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan dua pertanyaan : prakondisi- prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil?, Hambatan- hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal?, Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan itu dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Keempat faktor atau variabel ini harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang meliputi interaksi banyak faktor. Variabel- variabel yang dimaksud oleh Edwards III adalah :

1. Komunikasi (*Communications*)
2. Sumber Daya (*Resources*)
3. Sikap (*Dispositions/Attitudes*)
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)



Gambar 2.3 Variabel Edward III

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C Edward III dalam Agustino (2002) adalah komunikasi. Menurut Edward III komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmision informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu :

- b. Transmisi, Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Seringkali masalah transmisi terjadi manakala pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) tersebut dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau bahkan menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi manakala kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau karena tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumberdaya).
- c. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureauacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- d. Konsistensi, Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik namun dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang bisa menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya karena : i). Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan; ii). Kesulitan yang biasa muncul saat memulai implementasi sebuah kebijakan baru; iii). Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, aau kadang karena bertentangan dengan kebijakan yang lain; iv). Banyaknya pengaruh berbagai

kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara

politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Pengertian disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang

tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Terdapat tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

- a. Kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangatlah penting bagi aparat pelaksana lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.
- b. Arahan dan tanggapan pelaksanaan, hal ini meliputi bagaimana penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
- c. Intensitas respon atau tanggapan pelaksana.

Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk memblokkkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dengan sikap pelaksana tersebut dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C Edward III, adalah :

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Struktur Birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan manakala implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah lebih baik, adalah melakukan Standar Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Sikap dan Birokrasi, dimana ke 4 faktor tersebut saling berpengaruh satu sama lain terhadap kebijakan implementasi ini. Pada pelaksanaannya, implementasi ini terdapat 2 faktor penting lain ketika pelaksanaannya, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat sehingga perlu adanya keseimbangan dan kesesuaian agar kebijakan tersebut terus berjalan dan sesuai harapan, sehingga akan terbentuk gagasan baru untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di RPH dan Pengendalian Pemotongan ternak betina produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat dimasa yang akan datang.

C. Operasional Konsep Rumah Potong Hewan

Pokok permasalahan implementasi kebijakan pemotongan ternak di rumah potong hewan di kabupaten kotawaringin barat dihadapkan pada beberapa permasalahan yakni :

- a) Kurangnya SDM para peternak dan pelaku usaha ternak dalam melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh instansi terkait perihal larangan pemotongan sapi betina produktif dan wajib memotong ternak pada RPH, sehingga dalam pelaksanaannya masih ada pelaku usaha ternak memotong ternaknya diluar RPH.
- b) Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan pada RPH di Kabupaten Kobar sehingga menjadi faktor penghambat target capaian jumlah pemotongan ternak untuk kontribusi PAD Kabupaten Kobar.

Sejalan dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan konsep yang terukur untuk memperbaiki permasalahan – permasalahan tersebut yakni dengan terus aktif melakukan sosialisasi kepada peternak dan pelaku usaha, agar ternaknya

wajib dipotong di RPH. Sehingga dapat meningkatkan kualitas dan menjamin hasil ternak dari segi Aman, Sehat, Utuh dan Halal untuk dikonsumsi serta mampu meningkatkan PAD daerah.

D. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukann oleh Winda Paramita (UI,2012) berjudul : “Analisis Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi pada Implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana Bidang Pedidiikan di Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur”. Penelitian tersebut menggunakan paradikma positif dengan metode perpaduan kuantitatif dan kualitataif. Model yang digunakan berasal dari George C. Edward III tentang 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua faktor itu masih kategori sedang, yakni perlu ditingkatkan agar lebih maksimal dan efektif sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk lebih mandiri dalam penanggulangan bencana bidang pendidikan.

Eko Slamet Riyanto dalam penelitiannya: “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Forum Tatap Muka di Badan Informasi Publik Kominfo” (UI, 2010), berusaha mengukur dapat tidaknya kebijakan mencapai sasaran dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III tentang 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan positif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyebaran public melalui forum tatap muka sudah ccukup berhasil.

Kunto Hamidjoyo melakukan tesis pada Universitas Diponegoro (2004) berjudul: “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta (Studi Kasus Kecamatan Laweyan)”. Penelitian tersebut mengkaji tentang keberhasilan implementasi kebijakan perda Nomor 8 Tahun 1995 Pemkot Surakarta dengan studi kasus di Kecamatan Laweyan dengan menggunakan pendekatan positif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kondisi lingkungan, komunikasi dan perilaku pelaksana dengan keberhasilan implementasi kebijakan Perda Nomor 8 tersebut sebesar 66,22%, sedangkan kondisi lingkungan menyumbang sebesar 33,78% ditentukan oleh variable lain. Dari uji determinasi 66,22% tersebut, kondisi lingkungan menyumbang 25%, komunikasi menyumbang 53% dan perilaku pelaksana menyumbang 22%. Ketiga penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini lebih lanjut dapat digambarkan melalui matriks dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Aspek	Winda Paramita (tesis, UI, 2012)	Eko Slamet Riyanto (tesis, UI, 2010)	Kunto Hamidjoyo (tesis, Undip, 2004)
Judul	“Analisis Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi pada Implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana Bidang Pedidikan di Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur”	“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Forum Tatap Muka di Badan Informasi Publik Kominfo”	“Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta (Studi Kasus Kecamatan Laweyan)”

Aspek	Winda Paramita (tesis, UI, 2012)	Eko Slamet Riyanto (tesis, UI,2010)	Kunto Hamidjoyo (tesis, Undip,2004)
Latar belakang	Munculnya kebijakan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan khususnya di Kab. Tasikmalaya dan Cianjur menjadi menarik untuk diteliti.	Pembentukan Badan Informasi Publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara yang menyebutkan bahwa BIP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik.	Terbitnya Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penataan, Pembinaan dan Penertiban PKL di Kota Surakarta menjadi ujian bagi Pemkot untuk menerapkan implementasi kebijakan tersebut di Kccamatan Laweyan Kota Surakarta.
Tujuan	Mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan, terutama di kalangan tenaga pendidik di kedua Kabupaten.	Untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi public melalui program tatap muka yang dilakukan Kementerian Koinfo.	Untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi Perda No. 8 Tahun 1995 khususnya bagi PKL di Kecamatan Laweyan.
Aspek	Winda Paramita (tesis, UI, 2012)	Eko Slamet Riyanto (tesis, UI,2010)	Kunto Hamidjoyo (tesis, Undip,2004)
Instrumen Penelitian	Kuisisioner, Wawancara dan Dokumentasi	Kuisisioner, Wawancara dan Dokumentasi	Kuisisioner, Wawancara dan Dokumentasi
Teori yang Digunakan	George C. Edwards III	George C. Edwards III	Van Meter & Van Horn, George C. Edwards III
Hasil Penelitian	Semua dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi masih kategori sedang pengaruhnya.	Dari keempat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, faktor komunikasi,	Ada pengaruh yang signifikan antara kondisi lingkungan, komunikasi dan perilaku pelaksana dengan keberhasilan

	Sehingga keempat faktor itu harus ditingkatkan agar implementasinya lebih maksimal dan efektif.	sumberdaya, dan disposisi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan struktur birokrasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan.	implementasi kebijakan
--	---	---	------------------------



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Untuk menemukan, mamahami dan mendapatkan deskripsi secara jelas serta mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Melalui penelitian kualitatif dianggap lebih mampu untuk mengkaji dan menggambarkan berbagai fenomena sosial dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara mendalam. Disamping itu tentunya memerlukan suatu proses penelitian yang sifatnya naturalistik dan berusaha mengemukakan sebuah fenomena sosial berdasarkan kenyataan apa adanya, Lincoln dan Guba (1982).

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan kemudian dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat maupun gambar. Sebagai sebuah penelitian kualitatif dan yang membedakannya dengan penelitian kuantitatif adalah peneliti tidak melakukan pengujian hipotesis, tidak juga melakukan pengukuran secara integral dalam proses penelitian tetapi melakukan kajian mengenai dimensi kehidupan sosial, menginterpretasi fenomena sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan program Pembangunan Peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk itu sangat diperlukan pengamatan dan pencarian informasi secara mendalam sehingga

peneliti harus benar-benar terlibat dan berinteraksi dengan baik kepada pihak yang terlibat dan memahami program tersebut.

Dipilihnya program Peternakan dalam kegiatan pemotongan ternak di RPH sebagai topik kajian dalam penelitian ini dilandasi oleh pemikiran bahwa sebuah kebijakan publik/program pembangunan tidak hanya produk dari sebuah pemerintahan tetapi sebenarnya merupakan cerminan dari sebuah kepentingan, sikap, masalah, kebutuhan dan tujuan atau kondisi ideal yang hendak diwujudkan. Dengan alasan ini, maka kajian pelaksanaan program pembangunan tidak hanya sekedar membuka secara lebar aspek sikap dan kepentingan pemerintah (seperti yang tertuang dalam program pembangunan) yang hendak dicapai melalui kebijakan publik tersebut tetapi juga untuk merealisasikan program dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran program pembangunan. Dengan demikian maka untuk memberikan gambaran dan melakukan analisis terutama yang berhubungan dengan program Peternakan pada kegiatan pemotongan ternak di RPH di Kabupaten Kotawaringin Barat, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

B. Sumber Informasi dan Informan Penelitian

Secara umum dalam penelitian kualitatif, penarikan dan penetapan informan tidak hanya meliputi keputusan-keputusan tentang orang-orang mana yang diamati atau diwawancarai, tetapi juga mengenai latar-latar, peristiwa-peristiwa dan proses-proses sosial (Miles & Huberman, 1992). Informan diperlukan sebagai kelengkapan dalam metode kualitatif yang ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu, yakni dengan memilih orang-orang dari

berbagai kesimpulan yang dinilai mengetahui dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung serta menguasai informasi yang berkaitan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian. Informan lain juga memungkinkan untuk diminta informasi ataupun data apabila peneliti merasa masih memerlukan informasi untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh dari informan kunci, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih lengkap untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu peneliti untuk dapat memperoleh data dan informasi secara cepat dan akurat, untuk melakukan sinkronisasi, verifikasi dan atau melakukan perbandingan antara data yang satu dengan data yang lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut:

a. *Key Informan* (Informan Kunci)

Pada penelitian ini, Informan kunci akan ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan utama penentuan informan adalah penguasaan informasi dan data yang penulis perlukan. Pemilihan informan ini didasarkan atas subyek yang banyak memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data. Adapun yang menjadi sampel dan sekaligus sebagai informan dalam penelitian ini, adalah: 1) ditingkat pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari pegawai di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2), *stakeholders* dan pihak swasta/pelaku usaha yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan peternakan khususnya dalam pelaksanaan pemotongan ternak di RPH. Informan selanjutnya dipilih

didasarkan teknik *snow ball sampling*. Teknik ini dilakukan apabila peneliti merasa masih memerlukan informasi untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh dari informan kunci, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih lengkap untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Tabel.3.1 Informan Penelitian

NO	INFORMAN	JUMLAH RESPONDEN
INFORMAN INTERNAL		
1.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	1
2.	Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak	1
3.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	1
4.	Kepala Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan	1
5.	Kepala Seksi Produksi Ternak Ruminansia	1
6.	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner	1
7.	Petugas Rumah Potong Hewan	4
INFORMAN EKTERNAL		
8.	Petugas Lapangan/Petugas Inseminator	3
9.	Pelaku Usaha Pemotongan Ternak	5
	Jumlah	18

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

b. Peristiwa

Sumber informasi lain dalam penelitian ini adalah peristiwa yang mencakup segala sesuatu yang terjadi dan berhubungan program pembangunan peternakan khususnya pelaksanaan pemotongan ternak di RPH dalam upaya peningkatan pembangunan peternakan di kabupaten Kotawaringin Barat.

c. Dokumen

Sumber informasi ketiga dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, yang diperoleh dari pemerintahan, Kabupaten, Kecamatan dan hingga ke desa yang menjadi obyek penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah data-data statistik ataupun data lain yang

berhubungan dengan fokus penelitian, seperti data tentang populasi ternak besar (sapi), data kelompok tani ternak/pelaku usaha peternakan, profil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Instrumen Penelitian

Karena peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini peneliti akan lebih banyak menjadi instrumen, karena dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan *key instruments*. Peneliti sebagai instrumen tidak berarti harus menghilangkan aspek kemanusiawannya, tetapi kemampuan peneliti sebagai suatu individu dalam mengamati, bertanya, menelusuri dan mengabstraksikan merupakan instrumen yang sangat penting dan utama. Oleh karena itu yang diperlukan dalam diri seorang peneliti sebagai alat penelitian adalah kemampuan atau kapasitasnya sebagai peneliti. Selain peneliti sebagai instrumen utama, dalam hal ini peneliti juga menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi, buku catatan, *ballpoint*, pensil, alat perekam, dan lain-lain sebagai penunjang instrumen penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari suatu penelitian, apapun jenis penelitiannya, tidak terkecuali juga penelitian dalam disertasi ini. Sejalan dengan jenis dan tujuan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi serta melalui media internet.

a. Wawancara.

Wawancara yang dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) peneliti dengan pihak informan yang mengetahui, memahami serta memiliki data atau informasi yang terkait dengan proses pelaksanaan pemotongan ternak di RPH Kabupaten Kotawaringin Barat, baik secara lisan, tertulis maupun dengan media lainnya. Agar dapat fokus dalam melakukan wawancara kepada informan dalam rangka menggali informasi yang dibutuhkan, peneliti telah mempersiapkan pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan saja. Dalam melakukan wawancara peneliti dapat melakukan *face to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) atau mewawancarai mereka melalui telpon (Creswell, 2010:267).

b. Observasi.

Dalam penelitian kualitatif, tidak semua data bisa diambil melalui proses wawancara dan dokumentasi, oleh karena itu pada tahap ini peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung terhadap subyek dan obyek penelitian. Dalam tahap observasi peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti akan langsung ke lokasi penelitian, baik untuk melakukan wawancara maupun untuk melihat bagaimana kegiatan dan hasil yang telah dicapai melalui program-program yang telah dilaksanakan. Alat yang digunakan selama observasi adalah berupa alat perekam gambar dan suara (*audio recording*), pensil, buku catatan dan lain-lain yang diperlukan. Dengan observasi, peneliti dapat merekam dan mengamati sikap yang ditampilkan oleh informan dan secara langsung dapat memahami alasan keberatan, dukungan dan ketidakberpihakan mereka atas

sebuah fenomena yang ditanyakan peneliti seputar topik penelitian, baik pada saat melakukan wawancara maupun dalam kesempatan lain. Kemudian peneliti juga melakukan pengamatan terhadap obyek-obyek atau bentuk-bentuk kegiatan ataupun proyek-proyek yang sudah dilaksanakan. Alasan peneliti menggunakan teknik observasi ini sesuai dengan pendapat Guba dan Lincoln yang dikutip oleh Moleong (2004:174-175), yaitu : (1) Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung; (2) Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya; (3) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan profesional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data; (4) Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijangungnya ada yang keliru dan bias; (5) Dalam kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan, pengamatan menjadi alat yang sangat bermanfaat.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah sebagai data sekunder yang berupa setiap bahan tertulis ataupun film atau bentuk lain yang ditemukan dilapangan untuk dapat digunakan sebagai bukti untuk melakukan deskripsi dan analisis terhadap masalah dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dikumpulkan dari sumber data berupa : a) Undang-undang peternakan mengenai Kesehatan Masyarakat Veteriner, Surat Keputusan Bupati atau SKPD terkait pelaksanaan pemotongan ternak di RPH, b) dokumen administrasi seperti rencana aksi program, laporan kemajuan hasil pelaksanaan

program, dan c) Koran, artikel ataupun berita yang diperoleh dari harian umum media lokal dan kemudian juga dokumen-dokumen yang diperoleh melalui *website*, dan media internet atau situs-situs yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah secara *integrative*, dengan memilih sumber data menjadi dua katagori yakni data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang sesuai dengan fokus penelitian. Sehubungan dengan itu maka bentuk data dalam penelitian ini adalah :

- a) Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber (informan) yang sudah ditetapkan melalui kombinasi mendengar dan menyimak lalu menanyakan secara langsung kepada informan, melihat dan mengamati. Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan proses observasi.
- b) Data sekunder, yaitu data pendukung yang dapat menambah dan memperkaya data primer. Data ini diperoleh melalui hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, laporan-laporan, dokumen-dokumen, literatur serta peraturan- peraturan pemerintah yang relevan dengan penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif, yakni mencoba mengoptimalkan data di lapangan dengan data yang

dibutuhkan dalam proses analisa hasil sehingga kedua proses ini menjadi klop. Namun demikian dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak harus dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai semuanya. Tetapi analisis data merupakan proses yang berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mulai dari pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil. Analisis dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (1992), yang proses analisis datanya terdiri dari tiga komponen, yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data dan 3) penarikan kesimpulan. Secara jelasnya akan diuraikan berikut ini :

a) Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan diawali mengelompokkan data yang relevan, kemudian langkah selanjutnya disarikan substansi utama dari data yang diperoleh. Reduksi data dapat juga diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan dan mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan sementara.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dengan reduksi dapat menyederhanakan data dan mentransformasikannya melalui seleksi yang tepat, melalui ringkasan dan atau menggolongkannya dalam suatu pola atau bentuk sajian yang lebih jelas. Dengan demikian data-data kasar yang diperoleh di lapangan terkait dengan program Pembangunan Peternakan yang berhubungan dengan implementasinya akan direduksi data yaitu dengan menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data yang sesuai dengan fokus masalah. Sehingga data yang diperoleh dapat mendukung deskripsi untuk pemaparan dan sesuai dengan data yang diinginkan untuk menjawab rumusan masalah.

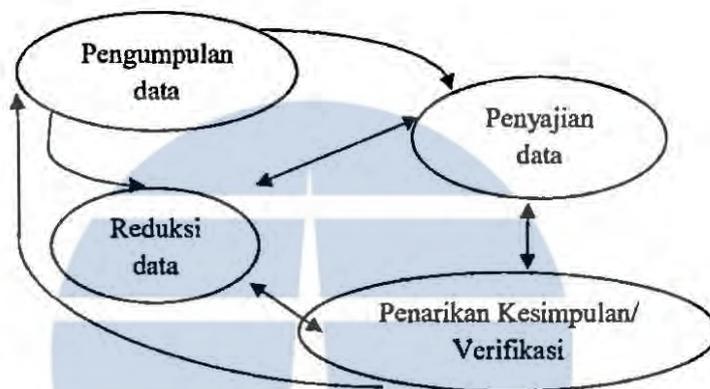
b) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara mengorganisir dan mendokumentasikan data yang terkumpul. Data yang terkumpul dan tersusun kemudian diamati untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian yang merupakan kecendrungan umum. Selanjutnya informasi yang dikumpulkan, ditata dan diklasifikasi dan digabungkan sehingga padu dan sistematis berupa naratif, tabel dan gambar. Penyajian data secara naratif menggunakan kutipan langsung ataupun tidak langsung. Kutipan langsung yang perlu diperjelas, dijelaskan sesuai dengan konteksnya. Dalam hal ini, hasil data telah diperoleh dan sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk narasi, tabel ataupun gambar.

c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tindakan mencari arti atas berbagai fenomena yang telah direkam dalam penyajian data. Fenomena itu mungkin telah direkam dalam bentuk keteraturan, pola-pola, persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan dan sebagainya. Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Pembangunan Peternakan dalam pelaksanaan pemotongan ternak di RPH yang dituangkan dalam bentuk simpulan sementara berdasarkan kesamaan ataupun perbedaannya.

Hal itu dilakukan secara terus-menerus sampai ditemui adanya kesimpulan yang kokoh dan valid. Verifikasi juga dilakukan dengan terus-menerus melakukan cross check atau penelurusan data melalui wawancara mendalam. Secara singkatnya analisis data model interaktif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1. Analisis data Model Interaktif (*Interactive Models*)
Sumber : Milles & Huberman (1992:18).

Berdasarkan model analisis interaktif, analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dalam bentuk interaktif melalui proses pengumpulan sebagai suatu siklus. Tujuannya adalah fokus pengamatan yang diperkirakan penting serta relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dapat dipertajam dan diperdalam, sebab pengamatan tanpa analisis dan penafsiran tidak mungkin dapat diketahui makna dari data tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

a. Kondisi geografis

Kabupaten Kotawaringin Barat yang beribukota di Pangkalan Bun, berada di Propinsi Kalimantan Tengah dan terletak di daerah khatulistiwa diantara: $1^{\circ} 19'$ sampai dengan $3^{\circ} 36'$ Lintang Selatan, $110^{\circ} 25'$ sampai dengan $112^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Terletak di antara 3 kabupaten yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 km². Dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten sesuai dengan UU No. 5 tahun 2002, Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau. Seiring dengan semakin berkembangnya Kabupaten Kotawaringin Barat maka sejak tahun 2003 sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2003 terjadi pemekaran kecamatan dari 4 kecamatan menjadi 6 kecamatan. Kecamatan yang mengalami pemekaran adalah Kecamatan Kumai yaitu menjadi Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Pangkalan Banteng.

Kecamatan Kumai merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 2.921 km² (28,13 persen dari total luas kabupaten), dan Kecamatan Pangkalan Lada merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 229

km² (3,08 persen dari total luas kabupaten). Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km² terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Arut Utara, pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kecamatan	Luas		Jumlah Desa/ Kelurahan
	km ²	%	
1. Arut Selatan	2.400	22,31	20
2. Kumai	2.921	27,15	18
3. Kotawaringin Lama	1.218	11,32	17
4. Arut Utara	2.685	24,96	11
5. Pangkalan Lada	229	3,08	11
6. Pangkalan Banteng	1.306	10,21	17
Kotawaringin Barat	10.759	100	94

Sumber : BPS Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2015

b. Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit- bukit yang terdiri dari :

- a) Sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah Latosol tahan terhadap erosi
- b) Bagian tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning juga tahan terhadap erosi.
- c) Sebelah selatan terdiri dari danau dan rawa- rawa Alluvial/ Organosol banyak mengandung air.

c. Geomorfologi

Keadaan geomorfologi/bentuk lahan terhadap ketinggian dari permukaan air laut dan persentase tingkat kemiringan menurut kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut ini.

Tabel 4.2. Tinggi dari permukaan laut dan persentase tingkat kemiringan menurut kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kecamatan	Ketinggian (MDPL)	Kemiringan (%)
1. Arut Selatan	0- 500	0- 40
2. Kumai	0- 500	0- 40
3. Kotawaringin Lama	7- 100	0- 2 dan 15- 40
4. Arut Utara	25 - (>500)	2- (>40)
5. Pangkalan Lada	0- 500	0- 40
6. Pangkalan Banteng	0- 500	0- 40

Sumber : BPS Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2015

d. Iklim

Faktor pembentuk iklim adalah curah hujan, suhu udara, kecepatan angin dan kelembaban. Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau pada bulan juni sampai dengan september sedangkan musim penghujan bulan oktober sampai dengan bulan mei. Suhu maksimum berkisar $31,0^{\circ}\text{C}$ – $33,8^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $21,3^{\circ}\text{C}$ – $23,4^{\circ}\text{C}$, kelembaban udara berkisar 85,58%.

e. Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 278.141 jiwa dengan laju pertumbuhan 3,16%. Walaupun luas wilayahnya paling kecil namun jumlah penduduk terpadat adalah di Kecamatan Pangkalan Lada.

Tabel 4.3. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kab. Kobar tahun 2013-2014

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	
		2014	2015	2014	2015
1	Kotawaringin Lama	18.695	19.157	2,54	2,47
2	Arut Selatan	111.658	114.952	3,03	2,95
3	Kumai	52.534	54.015	2,89	2,82
4	Pangkalan Banteng	37.231	38.993	4,80	4,73
5	Pangkalan Lada	31.589	32.494	2,94	2,86
6	Arut Utara	17.922	18.530	3,46	3,39
Kotawaringin Barat		269.629	278.141	3,32	3,16

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2016

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk biasanya lebih tinggi pada kawasan/daerah yang prasarana dan sarana dasar serta fasilitas umumnya cukup tersedia, selain daripada hal tersebut diatas pertumbuhan penduduk biasanya terpusat pada sentra-sentra tertentu seperti : tempat usaha/bekerja, pasar, pelabuhan, terminal dan sebagainya.

B. Profil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kobar

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpegang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai tindak lanjut Peraturan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).

a. Tugas Pokok

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. tahun 2016, tugas pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dibidang peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 13 (tiga belas) fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pengendalian dan penanggulangan bencana bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- h. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- j. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- l. Pembinaan kepada masyarakat tentang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana struktur organisasi, susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas Membantu Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b) Perencanaan strategis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- d) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- e) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g) pengendalian dan penanggulangan bencana bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- h) Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- j) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- l) Pembinaan kepada masyarakat tentang peternakan dan kesehatan hewan;
- m) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

b) Sekretaris terdiri dari:

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
- 2) Kepala Sub Bagian Keuangan
- 3) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran SKPD;
 - b) Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD ;
 - c) Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD;
 - d) Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD ;
 - e) Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu ; dan
 - f) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c) Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:**
- 1) Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan
 - 2) Seksi Pakan Ternak
 - 3) Seksi Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Bidang Prasarana dan Sarana. Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- b) Penyediaan dukungan infrastruktur peternakan dan kesehatan hewan;

- c) Pengembangan potensi dan pengelolaan kawasan peternakan;
- d) Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pakan, alat dan mesin serta obat-obatan peternakan dan kesehatan hewan;
- e) Penyiapan bahan rekomendasi teknis di bidang pengembangan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- f) Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengembangan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan; dan
- g) Pembinaan proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik menjadi informasi bidang prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan.
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, terdiri dari:

- 1) Seksi Perbibitan Ternak
- 2) Seksi Produksi Ternak Ruminansia
- 3) Seksi Produksi Ternak Non Ruminansia

Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbibitan dan produksi ternak. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan di bidang perbibitan dan produksi ternak;
- b) Pengelolaan sumber daya genetik hewan;

- c) Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak,
 - d) Pemberian bimbingan penerapan teknologi peningkatan produksi ternak;
 - e) Pembinaan teknis budidaya, teknologi reproduksi dan perbibitan ternak;
 - f) Pengendalian ternak ruminansia betina produktif
 - g) Pengawasan peredaran mutu benih/bibit ternak;
 - h) Pengembangan pola budidaya ternak;
 - i) Pembinaan dan pengawasan usaha perbibitan ternak;
 - j) Pengembangan teknologi budidaya ternak;
 - k) Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang peningkatan produksi dan produktivitas ternak;
 - l) Pembinaan proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik menjadi informasi pembibitan dan produksi ternak;
 - m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,**
terdiri dari:
1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, penyiapan pemberian rekomendasi teknis usaha di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat

veteriner (kesmavet), dan kesejahteraan hewan (kesrawan). Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesmavet, pengawasan obat dan pelayanan keswan;
- b) pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan; pengawasan obat hewan; pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, produk hewan, serta penerapan kesejahteraan hewan;
- c) pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- d) penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- e) pengendalian dan pengawasan obat kesehatan hewan
- f) pemberian rekomendasi teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g) pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, kesmavet, pengawasan obat dan pelayanan keswan; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan terdiri dari:

- 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- 2) Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan
- 3) Seksi Pembiayaan dan Investasi Peternakan

Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan

teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pasca panen, pengembangan SDM dan kelembagaan, serta pembiayaan dan investasi peternakan. Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan pasca panen, pengembangan SDM dan kelembagaan, serta pembiayaan dan investasi peternakan;
- b) Fasilitasi kegiatan pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan;
- c) Bimbingan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha peternakan;
- d) Fasilitasi kegiatan penyuluhan peternakan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- e) Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f) Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- g) Bimbingan fasilitasi pembiayaan dan pelayanan investasi usaha peternakan;
- h) Peningkatan kapasitas penyuluh Aparatur Sipil Negara, swadaya dan swasta;
- i) Pemantauan dan evaluasi di bidang pasca panen, pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan, serta pembiayaan dan investasi peternakan;
- j) Pembinaan proses pengumpulan, pengolahan, penyajian data statistik menjadi informasi bidang pasca panen, pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan, serta pembiayaan dan investasi peternakan; dan

- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang timbul sebagaimana dijelaskan pada latar belakang penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitian terkait Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil temuan penelitian secara langsung kepada responden yang telah ditentukan untuk menjawab permasalahan penelitian ini, baik dengan melalui wawancara, observasi maupun melalui dokumentasi yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

A. Analisis Program dengan Model Edwards III

Manfaat suatu program akan dapat dirasakan bila program tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Implementasi suatu program adalah proses dinamik yang meliputi interaksi banyak faktor. Secara teoritik, menurut Edwards III ada 4 variabel yang mempengaruhi implementasi suatu program, yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi (*Communications*)

Menurut Edwards III, ada 3 hal penting yang dapat dibahas dalam proses komunikasi program, yaitu transmisi, kejelasan (*clarity*) dan konsistensi.

1. Transmisi

Syarat awal untuk implementasi program yang efektif yaitu bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan dan perintah didalam program harus diteruskan

kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan seksama oleh para pelaksana. Berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat dan berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh kepala bidang dilingkup dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten kotawaringin barat yakni (1) Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, (2) Kepala Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan, (3) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana dan (4) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Medik Veteriner:

menurutnya, dalam hal pelaksanaan program Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat pada prinsipnya mereka mendukung secara utuh akan kegiatan ini dan saat digali terkait darimana dan bagaimana sumber kebijakan ini muncul, hal itupun di tanggapi oleh Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak bahwa beliau telah mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan sehubungan dengan Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat. (17 April 2017).

Diketahui bahwa dari paparan opini yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak tersebut diatas tentang kebijakan ini, menurut penulis bahwa pendalaman aspek mengenai dukungan dan sumber kekuatan aturan yang berlaku sudah sangat jelas diketahui dan dipahami oleh Ibu Risanty selaku Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan hal tersebut beliau juga menyampaikan dalam wawancara sebagai berikut ini:

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku pembuat kebijakan telah memberi informasi yang jelas mengenai Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif ini melalui pedoman teknis pengawasan pemotongan betina produktif dalam Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting tahun 2017 (UPSUS SIWAB), Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui kementerian Pertanian RI dengan Kepolisian Negara RI No.09001/HK.230/R/05/2017, Nomor B/44/2017 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia betina produktif tanggal 09 Mei 2017. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan Sosialisasi di 6 Kecamatan tentang pelarangan pemotongan betina produktif berdasarkan UU Nomor 41 tahun 2014, perubahan UU RI nomor 18 Tahun 2009, tentang kewajiban pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan.

Selanjutnya wawancara perihal Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat dan dari hasil wawancara yang telah diperoleh penulis dari Ibu Risanty selaku Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak ternyata masih perlu adanya penegasan guna memperoleh hasil validasi informasi yang terukur dan maksimal, dengan menghasilkan hasil wawancara sebagai berikut ini :

Senada dengan pernyataan tersebut diatas perihal kebijakan dan mekanisme pelaksanaannya dipertegas lagi oleh Kepala Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan dalam pelaksanaannya sejauh ini pemerintah daerah juga sudah berupaya seoptimal mungkin melakukan kegiatan sosialisasi, baik kepada pedagang ternak atau asosiasi jagal maupun juga aparatur desa di sekabupaten Kobar di 6 kecamatan yakni Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kolam, P.Lada, P.Banteng dan Aruta yang bertempat di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun di aula Kecamatan Setempat. Selain itu, kita juga lakukan bekerjasama dengan beberapa instansi yang ada seperti Polri untuk menjalankan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (2) bahwa ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Lebih jelas lagi beliau menambahkan jikalau pemotongan betina produktif ini masih dilakukan tentunya akan mengurangi populasi induk yang akan menghasilkan bibit ternak. Ya, upaya yang dilakukan untuk kegiatan tersebut tentunya sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan jumlah betina produktif yang merupakan pabrikaan dalam menghasilkan bibit ternak yang berkorelasi secara langsung terhadap upaya peningkatan populasi dan produksi ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu, asosiasi usaha pemotongan ternak/jagal dan aparatur desa yang ada tidak hanya terkait dalam penyelamatan betina produktif atau pemotongan hewan ternak yang ada di RPH, tapi kedepan yang ingin kita upayakan bagaimana lalu lintas ternak bisa lebih tertibkan di tingkat wilayah desa, kelurahan atau administrasi di Kabupaten dan pada akhirnya semua permasalahan dapat kita atasi secara bersama dengan aturan sesuai koridor yang berlaku.

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Dedi Mulyadi selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan saat diwawancarai yakni :

menurut Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, dalam hal ini secara garis besar beliau hanya menambahkan, mengingat program dan kegiatan ini banyak melibatkan berbagai unsur jajaran yang terkait didalamnya maka perlu adanya peningkatan dalam hal teknis dilapangan dan nonteknis, khususnya peningkatan fasilitas perlengkapan di Rumah Potong Hewan yang masih kurang. Sehingga pelayanan dapat mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap Rumah Potong Hewan kedepan.

Hal tersebut diperkuat lagi oleh hasil wawancara kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Medik Veteriner beliau mengungkapkan bahwa selain melengkapi beberapa kekurangan fasilitas yang di Rumah Potong Hewan kita harus solid dalam semua lini yang terkait baik dari dalam maupun dari luar instansi, agar kinerja dapat menjadi lebih baik untuk mewujudkan suksesnya program ini.

Berdasarkan beberapa pendapat yang disampaikan tersebut diatas menyatakan bahwa dengan adanya pedoman umum dan petunjuk teknis tersebut menggambarkan bahwa, seluruh Kepala Bidang di lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai bagian dari pelaksana

Implementasi Kebijakan pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat ini telah memahami secara baik tentang bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilakukan supaya tidak bergeser dari tujuan yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi dari berbagai pernyataan hasil wawancara tersebut diatas dapat diberikan solusi yakni pemantapan personil berbasis skill dan kemampuan yang perlu ditingkatkan dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi terhadap tim kerja terhadap situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, sehingga segala kesulitan dapat diatasi secara bersama. Sedangkan dari segi kurnangya perlengkapan terkait kegiatan di Rumah Potong Hewan, solusi yang harus dilakukan adalah dengan melakukan penambahan perlengkapan prasarana dan sarana melalui anggaran belanja daerah.

b. Kejelasan (*Clarity*)

Kejelasan informasi mengenai sasaran dan tujuan Implementasi Kebijakan pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat, berarti pihak yang merumuskan kebijakan dalam hal ini Pemerintah melalui Larangan penyembelihan sapi betina produktif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (4), menyebutkan setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rumah Potong Hewan, Unggas Dan Pelayanan

Tekhnis Dibidang Peternakan. Memberikan penjelasan secara terperinci tentang tujuan yang ingin dicapai pada Implementasi kebijakan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak betina produktif, ini.

Hasil wawancara dengan masing-masing Kepala Bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat perihal Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat, telah diterima oleh pelaksana di masing-masing perwakilan seksi dan staff pegawai Rumah potong Hewan yang dipilih peneliti yang ada dilingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat, dimengerti cukup jelas mengenai maksud dan tujuan dari implementasi kebijakan ini.

(1) Menurut Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner saat diwawancarai perihal kebijakan ini yakni:

menurutnya program ini sangat bagus untuk peningkatan populasi ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat bilamana kegiatan razia dilapangan kerap dilakukan dan menimbulkan efek jera kepada pelaku yang melanggar aturan tersebut, sedangkan dari segi manfaatnya adalah untuk kepentingan dan manfaat kepada peternak itu sendiri. Dari unsur kepuasan konsumen tentu merasakan dampak yang aman dengan pembelian daging dipasaran yang beredar bilamana ternak daging berasal dari Rumah Potong Hewan.

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat (2) Bapak Supriyetno dan Bapak Yulianto selaku Pelaksana di RPH dalam hal ini ia mengungkapkan saat di wawancara bahwa kebijakan implementasi ini jika berhasil, maka akan berdampak pada semakin meningkatnya populasi ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat dan menjamin kelayakan mutu dan kualitas daging yang dihasilkan untuk konsumen/masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dari segi aman,sehat,utuh dan halal untuk dikonsumsi. Untuk kemajuan daerah tentunya dari sektor kontribusi pendapatan asli daerah yang berdampak pada pembangunan secara umum dan untuk peternakan secara khusus. Lebih lanjut beliau mengatakan dengan adanya implementasi kebijakan ini maka dapat melakukan pengawasan dan

pendataan terhadap para jagal, Pendampingan dan pengawasan kepada para jagal, mengawal dan membantu petani untuk kebijakan ini serta Pendampingan kepada kelompok peternak.

Senada dengan pernyataan oleh Bapak Supriyetno dan Bapak Yulianto tersebut diatas, menurut (4) Bapak Hamdani Akbar selaku petugas di Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa:

saya mengetahui adanya program ini tahun 2015 sejak berdirinya RPH dengan tujuan agar terawasinya pemotongan ternak di Pangkalanbun dengan target melakukan pendataan terhadap pelaku pemotong ternak, sosialisasi kebijakan dan mengawasi secara tepat terhadap ternak yang akan di potong di RPH. Selanjutnya menurut pernyataan tersebut di pertegas lagi oleh (5) Ibu Dina yang merupakan petugas administrasi pada RPH di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat yang dalam sesi wawancara ia mengatakan bahwa terkait implementasi kebijakan ini ia mengungkapkan bahwa program ini sangat bagus untuk di terapkan yang berdampak pada peningkatan populasi ternak sapi potong dan penyelamatan betina produktif agar tetap terus menghasilkan bibit dan mampu mencukupi kebutuhan konsumsi di masyarakat. Dari segi kualitas tentunya daging yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh RPH mempunyai tingkat keamanan yang dijamin dari segi aman, sehat, utuh dan halal. Sebab dalam proses penyembelihan menggunakan syariat islam dan mampu mengontrol para pengusaha ternak/jagal dalam meminimalisir seminim mungkin adanya pemotongan diluar RPH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pernyataan Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Bapak Hamdani mereka mengungkapkan bahwa program ini sangat bagus untuk peningkatan populasi ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat bilamana kegiatan razia dilapangan kerap dilakukan dan menimbulkan efek jera kepada pelaku yang melanggar aturan tersebut, sedangkan dari segi manfaatnya adalah untuk kepentingan dan manfaat kepada peternak itu sendiri. Dari unsur kepuasan konsumen tentu merasakan dampak yang aman dengan pembelian daging dipasar yang

beredar bilamana ternak daging berasal dari Rumah Potong Hewan serta agar terawasinya pemotongan ternak di pangkalanbun dengan target melakukan pendataan terhadap pelaku pemotong ternak, sosialisasi kebijakan dan mengawasi secara tepat terhadap ternak yang akan di potong di RPH.

Hal ini ditambahkan lagi dengan pernyataan salah seorang pelaku usaha ternak/jagal menurutnya kebijakan ini cukup jelas dimengerti dan dipahami bagi kami khususnya pelaku usaha lebih berhati-hati kedepan, sebab sebelum adanya aturan ini kami menyadari terkadang tidak tahu asal-usul ternak yang kami beli apakah bantuan atau milik perorangan. Dengan adanya aturan ini kami berterimakasih sekali karena selain ternak tersebut aman dan layak dikonsumsi terlebih sudah terjamin oleh semua pihak yang mendukung kebijakan ini ungkapnya.

c. Konsistensi

Bila implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, aturan pelaksanaan harus jelas dan konsisten dan tidak boleh saling bertolak belakang. Mekanisme pelaksanaan program Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat, pihak yang terhimpun dan terkait untuk menjalankan program ini sudah konsisten dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dicapai.

Pada hasil wawancara yang dilakukan terlihat tidak ada suatu tanggapan dan pernyataan yang bersifat bertolak belakang dengan pelaksanaan program Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak Kabupaten Kotawaringin Barat berikut:

Saya selaku Kepala Bidang sangat konsisten mendukung program ini. Dengan adanya program ini maka akan meminimalisir adanya kegiatan pemotongan betina produktif diluar RPH meskipun pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku belum ada. Dari segi keuangan daerah, program ini sangat membantu daerah dalam kemampuan daerah meningkatkan populasi ternak melalui APBD Kabupaten dan kontribusi pendapatan daerah. Jadi bila dilihat dari maksud dan tujuan program ini sangat baik dan perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pernyataan ini pula didukung oleh Kepala Seksi Pengembangan Bibit

Ternak berikut ini:

Kami selaku pelaksana program dilapangan dengan adanya program ini menerima dan mengapresiasi serta mendukung sepenuhnya, hal ini dikarenakan sangat membantu pengusaha ternak dan peternak dengan adanya program ini. Disamping itu pula untuk meningkatkan populasi ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari ungkapan yang telah dikemukakan tersebut diatas bahwa pelaksana program cukup konsisten dan mendukung pelaksanaan program ini dan tanggapan yang disampaikan sangat positif dan didukung Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rumah Pemotongan Hewan, Unggas Dan Pelayanan Tekhnis Dibidang Peternakan. Sebab program yang dilaksanakan merupakan suatu program yang baik dan sesuai dengan keadaan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka peningkatkan populasi dan penyelamatan betina produktif untuk menghasilkan bibit ternak yang unggul.

d. Koordinasi

Agar program Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat didukung sepenuhnya oleh instansi dan

lembaga terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait usaha hasil ternak, Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPPKP) perihal bimbingan dan sosialisasi di lapangan, karena dalam struktur birokrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berada di dalam organisasi KPPKP, sedangkan untuk melaksanakan kegiatan baik itu pembinaan dan pengawasan yang berhubungan dengan petani adalah PPL setempat. Kemudian Aparat penegak hukum yakni Pihak Kepolisian yang juga dilibatkan terkait pelanggaran yang dilakukan perihal pemotongan betina produktif dan aparatur desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang juga dilibatkan untuk mendukung dalam implementasi kebijakan ini.

Koordinasi pelaksanaan Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak

dalam pelaksanaan program ini, koordinasi antar semua lini instansi yang terlibat sudah cukup baik, terutama koordinasi dengan instansi KPPKP dengan rutusnya pendampingan petugas pada saat pelaksanaan program yang dilakukan baik di lapangan maupun di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pernyataan ini didukung oleh Kepala Seksi Pengembangan Bibit Ternak, sebagai berikut:

kami telah melaksanakan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait dalam melaksanakan Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPPKP) dikarenakan pelaksanaan program dilapangan berkaitan dengan instansi ini khususnya petugas yang berada di bawah naungannya yaitu Penyuluh Pertanian/Peternakan Lapangan (PPL)

sebagai pemangku wilayah kerja kepenyuluhan agar pelaksanaan program ini sesuai prosedur dilapangan.

Selanjutnya kepala Seksi Pengembangan Bibit Ternak menambahkan :

Secara periodik, kami sebagai pelaksana tingkat kabupaten secara langsung berkoordinasi dengan tim pelaksana lapangan, PPL, inseminator, tim pendamping dinas dan paramedis serta ibu Kepala Bidang dan Kepala Bidang lain dilingkup Dinas peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai penanggung jawab baik via media sosialisasi dan media elektronik sehingga kendala dilapangan cepat terdeteksi sedini mungkin,”

Sedangkan menurut beberapa Petugas Inseminator yang telah diwawancarai mengatakan sebagai berikut :

1. Petugas Inseminator Desa Kumpai Batu Kecamatan Arut Selatan Bapak Yuriani, dan Bapak Suryadi Inseminator Desa Amin jaya Kecamatan Pangkalan Banteng mengatakan Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat ini telah mereka ketahui seperti saat di wawancarai :

Menurut Bapak Yuriani, informasi program ini diketahui melalui media cetak koran daerah Borneo News pada bulan februari 2017 dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui sosialisasi dilapangan sehingga secara umum kami cukup memahami tujuan dari program ini. Terlebih wilayah tugas yang di emban merupakan daerah dengan populasi betina produktif terbanyak di antara Desa yang ada diwilayah Kecamatan Arut Selatan, serta mendukung sepenuhnya program ini untuk terus meningkatkan populasi sapi potong di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Hal tersebut diperkuat lagi menurut Bapak Suryadi menurutnya sangat mendukung dengan adanya Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pelaksana dilapangan secara langsung mudah berkoordinasi dengan tim pelaksana Kabupaten sebagai penanggung jawab kegiatan, setiap saat dapat berkomunikasi intens secara terus menerus melalui media komunikasi Whats Up/Telepon tentang laporan pelaksanaan kegiatan dilapangan sehingga setiap

ada permasalahan dilapangan langsung diberikan solusi oleh tim inti yang memiliki kewenangan dalam kebijakan ini.

Berbeda dengan pengakuan Petugas Inseminator lapangan Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada Bapak Asep, ia mengetahui program ini baru diketahui saat diwawancarai oleh peneliti terkait Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat dan berharap agar pemerintah daerah benar-benar melaksanakan program ini dengan sabik-baiknya imbuhnya.

2. Sedangkan menurut pelaku pengusaha pemotong ternak (jagal):

Bapak Misli menurutnya bahwa program ini diketahui sejak 5 tahun yang lalu dari sosialisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat dan mendukung akan program ini guna terciptanya kualitas daging aman,sehat,asuh dan halal bagi kami selaku pengusaha untuk kenyamanan konsumen/masyarakat yang mengkonsumsi dan mengurangi pemotongan betina produktif sekecil mungkin. Sedangkan menurut Bapak Sauri menurutnya program ini diketahui sejak beberapa bulan yang lalu dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuan dari program ini agar dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya agar tertib memotong ternaknya di RPH secara tertib. Bebeda dengan pengakuan Bapak Torikil Mustofa dan bapak Samudin bahwa program ini diketahui sejak april tahun 2017 dari beberapa spanduk yang tersebar di berbagai daerah. Menurutnya program ini bila dilihat dari segi sanitasi RPH berkaitan dengan penanganan limbah agar tidak mencemari lingkungan jika pemotongan dilakukan di RPH, sedangkan dari segi penyelamatan betina produktif untuk meningkatkan jumlah ternak sapi di Kabupaten Kotawaringin Barat tegasnya.

Dalam suatu implementasi program kebijakan, komunikasi dan koordinasi semua instansi dan lini yang sangat diperlukan karena akan mempengaruhi pada hasil implementasi program tersebut. Pada pelaksanaan Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan

bahwa transmisi, koordinasi, dan konsistensi telah dapat terlaksana secara baik antara pelaksana program dilapangan dan pembuat program.

Hal ini dapat diketahui bahwa sebagai pembuat program kebijakan, Kementerian Pertanian Undang-Undang No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (4) dan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada semua Kepala Bidang di lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perwakilan Kepala Seksi Pengembangan Bibit Ternak, Petugas Inseminator Lapangan, Pelaku Usaha Ternak dan peternak. Dari hasil informasi yang digali dan diperoleh terlihat bahwa informasi Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat sangat jelas diserahkan dari pembuat program yaitu Kementerian Pertanian kepada pelaksana program yaitu salah satunya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten, informasi kemudian diteruskan kepada seluruh instansi/badan/lembaga terkait program ini melalui pertemuan sosialisasi dan koordinasi di tingkat kabupaten yang lakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, setelah itu dilaksanakan pertemuan teknis dengan mengundang Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan, Petugas Inseminator beserta pelaku usaha peternakan dan peternak serta asosiasi usaha peternak untuk bersama-sama melaksanakan program ini. Untuk informasi di tingkat peternak dan pelaku usaha ternak disampaikan melalui sosialisasi di desa setempat didampingi oleh petugas inseminator dan pemasangan baleho tentang Implementasi kebijakan

Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat beserta paratur desa setempat.

Jadi pada pelaksanaan Program Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat, menurut peneliti dari faktor informasi dari segi kejelasannya sudah sangat jelas dari tingkat Kabupaten sampai kepada semua pihak yang terlibat pada kebijakan ini mulai dari tingkat peternak, pelaku usaha, aparatur desa dan daerah yang terlibat. Dari hasil wawancara yang dilakukan tidak adanya suatu pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat program.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi komunikasi baik dari aspek transmisi, kejelasan, konsistensi, dan koordinasi dalam kondisi baik. Sehingga tidak ada hal yang kurang jelas dalam pelaksanaan terkait Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat dari segi koordinasi yang terjadi.

Sehingga berpengaruh positif terhadap setiap kegiatan yang dilakukan terkait kebijakan ini dan mengarah kepada tingkat keberhasilan yang diinginkan secara bersama baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat luas pada umumnya. Adapun untuk lebih jelasnya tersaji kedalam tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4 Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Komunikasi dan Koordinasi.

No	Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
1	Transmisi	Berkaitan dengan Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat, seluruh jajaran Pelaksana telah cukup memahami tindakan apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan program ini dengan baik dan sesuai prosedur.	Keputusan Program dan perintah telah berdasar dan mengacu pada Undang-Undang No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (4) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rumah Potong Hewan, Unggas Dan Pelayanan Tekhnis Dibidang Peternakan.
3	Konsistensi	Seluruh pihak yang melaksanakan program ini sudah konsisten dengan perintah pelaksanaan tujuan program dan kebijakan ini.	Perintah pelaksanaan yang diterima cukup jelas dan tidak bertentangan.
4	Koordinasi	Koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait telah dilaksanakan secara baik.	Dilakukan koordinasi formal (sosialisasi, pertemuan, koordinasi, media penyampaian informasi melalui sebaran baleho di titik strategis di tiap wilayah desa, komunikasi HP/WA) dan konsolidasi terhadap petugas inseminator terkait program ini.

Sumber : Data Primer diolah, 2017

e. Sumber Daya (*Resources*)

Komponen pokok sumber daya meliputi sumber daya manusia (SDM) baik jumlah staf dan keahlian, informasi yang relevan, kewenangan dan fasilitas. Keadaan sumber daya terkait dengan Implementasi Kebijakan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dijelaskan sebagai berikut dibawah ini:

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan kunci dalam pelaksanaan implementasi program. Sumber daya manusia merupakan faktor aktif yang berperan memberdayakan serta mengelola faktor-faktor yang ada. Ketersediaan anggaran yang cukup serta sarana dan prasarana yang lengkap tanpa dukungan sumber daya manusia yang profesional membuat implementasi program tidak akan berhasil. Berkaitan dengan implementasi kebijakan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat, menurut (1) Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, (2) Kepala Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan, (3) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana dan (4) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Medik Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat yang terangkum saat sesi wawancara terhadap responden, bahwa program ini merupakan langkah khusus dalam rangka dan upaya penyelamatan betina produktif serta meningkatkan populasi bibit ternak sapi potong di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka memenuhi permintaan dan kebutuhan konsumen/masyarakat yang pada akhirnya mampu menciptakan swasembada daging untuk daerah khususnya dan pemenuhan kebutuhan daging se provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya dapat terwujud dengan adanya program pemerintah pusat perihal swasembada daging.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas jelas bahwa faktor sumberdaya manusia memiliki peranan penting akan keberhasilan Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Namun untuk mencapai program tersebut tentu semua pihak yang terkait juga di ikutsertakan dan terlibat guna mendukung secara optimal agar program Implementasi kebijakan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat terus berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang optimal.

Dengan melibatkan beberapa instansi lain seperti Dinas Pasar, Aparat penegak hukum yakni Polri, Petugas Penyuluh Lapangan yang berfungsi bersama serentak menyuarakan aspirasi dan dukungan dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan terhadap peternak, pelaku usaha dan masyarakat lokal akan pentingnya kesadaran untuk pemenuhan produk pangan hasil ternak dimasa akan datang. Sehingga kita tidak perlu lagi mendatangkan ternak dari luar daerah untuk mencukupi kebutuhan akan produk daging sapi potong dalam daerah itu sendiri, serta melibatkan unsur aparatur desa guna mendorong keberlanjutan program ini mulai dari perangkat pemerintah daerah/kota hingga ke desa-desa.

Kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait program Implementasi kebijakan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat ini melibatkan perwakilan masing-masing bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Kotawaringin Barat yakni Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak sebanyak 15 orang, Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan sebanyak 4 orang, Bidang Prasarana dan Sarana sebanyak 3 orang dan Bidang Kesehatan Hewan dan Medik Veteriner sebanyak 9 orang.

Berdasarkan jabatan struktural sebagai berikut:

Tabel 4.5 Kualifikasi SDM yang terlibat pada program Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat.

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (Org)
1	Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak	Sarjana (S1)	1
2	Kepala Seksi Perbibitan	Pasca Sarjana (S2)	1
	Kepala Seksi Ruminansia	Pasca Sarjana (S2)	1
	Staf PNS	Sarjana (S1)	3
	Staf Honoror	Sarjana (S1)	3
	Petugas Inseminator PNS Lapangan	Sarjana (S1)	1
3	Petugas Inseminator Honoror Lapangan	SMA/SNAKMA	5
4	Kepala Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan	Pasca Sarjana (S2)	1
5	Kepala Seksi Investasi dan Pembiayaan	Diploma 3	1
6	Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran	Pasca Sarjana (S2)	1
7	Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan	Sarjana (S1)	1
8	Staf PNS	Sarjana (S1)	1
9	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Sarjana (S1)	1
10	Staff PNS	Sarjana (S1)	1
11	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Medik Veteriner	Pasca Sarjana (S2)	1
12	Kepala Seksi		
13	Petugas PNS RPH	Diploma 3	1
13	Petugas PNS RPH	SMA	1
	Petugas Honoror RPH	Sarjana (S1)	2
	Jumlah		27

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari segi jumlah personil cukup optimal jika dikaitkan dengan jumlah tugas dan kegiatan yang harus mereka selesaikan terkait Implementasi kebijakan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat, ditambah lagi peran serta instansi dan lembaga beserta asosiasi pengusaha ternak juga dilibatkan dalam program tersebut.

Program Implementasi kebijakan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kebijakan yang diamanatkan Pemerintah pusat guna memajukan ranah peternakan menjadi lebih baik dari masa-kemasa yang akan datang. Karena itu perlu penanganan yang baik sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sehingga pada pelaksanaan program ini, sumber daya manusia harus memahami betul dan mengerti target yang hendak dicapai dari program ini.

Tabel 4.6 Data Angka Tetap Pemotongan Sapi dan Kerbau Tahun 2015 dan Angka Sementara Tahun 2016 di Kotawaringin Barat

Tabel 4.6 Table		Produksi Daging Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan (Ton), 2015			
		Meat Production by Livestock and Subdistrict, 2015			
		Jenis Ternak/ Livestock			
Kecamatan/ Subdistrict	Sapi Potong/ Cow	Kambing/ Domba/ Goat	Babi/ Pig	Unggas/ Poultry	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01. Kotawaringin Lama	31,10	2,32	3,91	170,98	
02. Arut Selatan	389,06	21,96	7,77	348,42	
03. Kumai	51,32	10,20	-	269,93	
04. Pangkalan Banteng	42,78	13,36	26,37	104,11	
05. Pangkalan Lada	35,76	10,30	-	263,18	
06. Arut Utara	22,23	-	56,42	15,78	
Jumlah / Total 2015	572,25	58,14	94,47	1 172,40	
2014	553,00	49,62	93,25	1 219,74	
2013	552,00	49,43	94,00	1 218,69	
2012	565,64	49,01	87,81	1 111,58	
2011	527,43	46,07	90,86	1 003,00	
2010	517,14	42,27	90,25	964,84	

Sumber Data: BPS Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2015

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.6 diketahui bahwa jumlah produksi daging terus mengalami peningkatan diambil dari tahun 2014 sebesar 553 ton dan

ditahun 2015 menjadi 572,25 ton atau meningkat sebesar 0,97%. Meskipun masih belum signifikan.

Adanya Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan mampu meningkatkan produksi daging sekitar 3 kali lipat dari tahun ke tahun, sehingga mampu mencukupi permintaan konsumen/masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Mengingat pertumbuhan penduduk disetiap tahun yang mengalami peningkatan dan pokok utama mencegah dan mengurangi seminim mungkin perihal adanya pemotongan betina produktif yang terjadi dilapangan.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan, Kepala Seksi Bibit Ternak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini.

Menurut Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak :

Dari segi jumlah dan mutu, sumber daya manusia yang terdapat dalam bidang ini sudah cukup berperan, meskipun tidak bisa dipungkiri yang terjadi dilapangan masih ditemui adanya pelanggaran yang terjadi perihal kebijakan ini. Namun perlu kita garis bawahi bahwa kita sebagai aparatur sipil negara yang berfungsi sebagai pengabdian negara tentunya terus fokus dan bekerja keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang terlibat dalam kebijakan ini untuk mewujudkan suksesnya program ini apapun resiko dan tantangan yang kita hadapi dilapangan takkan mengurangi semangat dan perjuangan guna meningkatkan kesejahteraan peternak dan pengusaha ternak serta pendapatan asli daerah untuk pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Menurut Kasi Pengembangan Bibit Ternak mengatakan bahwa,

masalah sumber daya manusia yang ada masih perlu ditingkatkan salah satunya adanya penambahan staf dan petugas inseminator lapangan, petugas paramedik dan kesehatan hewan dan koordinasi antar semua lembaga perlu diperluas lagi, mengingat tugas yang ada cukup menantang dikarenakan area dari program ini yang tersebar di beberapa kecamatan, sehingga perlu evaluasi dan peran kontrol yang intensif terhadap semua pihak yang berperan serta suksesnya program ini.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa jumlah sumber daya manusia yang ada dari segi jumlah dapat dikatakan sudah cukup maksimal. Dari tabel yang telah disajikan, jumlah sumber daya manusia yang ada berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan tenaga honorer struktural dan fungsional yang berada dilingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dari uraian tersebut diatas dan berdasarkan pendapat yang telah disajikan bahwa perlu adanya evaluasi khusus disetiap kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan kekurangan yang harus dibenahi dalam melaksanakan rencana dan strategi dalam keberhasilan kebijakan ini.

b) Informasi yang Relevan

Penyampaian informasi yang relevan diperlukan agar Implementasi kebijakan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat terlaksana dengan baik. Informasi yang diperlukan disini adalah informasi bagaimana melaksanakan program tersebut agar tujuan dapat tercapai dan tidak menyimpang dari yang diharapkan, serta informasi mengenai tertibnya dari organisasi maupun individu terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam pelaksanaan program dengan melibatkan semua lembaga dan lini yang terkait.

Menurut Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak saat diwawancarai:

Perihal informasi relevan terkait kebijakan ini menurutnya saat diwawancarai, bahwa segala sesuatu yang terkait dengan aturan, kebijakan, program dan pelaksanaan harus mengacu pada informasi yang akurat. Sebab pentingnya sumber informasi yang baku dan terarah akan berdampak pada sistem yang tidak menimbulkan kebimbangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait implementasi kebijakan

ini. Melihat strukturisasi dari program ini melibatkan berbagai bentuk pelimpahan kewenangan dari berbagai pimpinan di semua lini yang terlibat pada program tersebut, maka tatanan sumber informasi dalam pelimpahan tugas kepada semua pihak yang berperan dan terlibat harus benar-benar memperoleh informasi yang jelas. Sehingga tanggung jawab terhadap tugas yang diemban akan terlaksana dengan baik pada prosedur yang baik pula imbuhnya.

Berdasar hasil pemantauan peneliti dapat diketahui bahwa informasi tentang bagaimana pelaksanaan Implementasi kebijakan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat ini telah disampaikan pada tingkat pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menerbitkan kebijakan ini, di teruskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pimpinan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah, Instansi dan Lembaga terkait, Aparat Penegak Hukum Polres Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta asosiasi pengusaha ternak dan peternak. Sehingga dengan adanya aturan-aturan tersebut dan koordinasi yang baik pada semua pihak yang terlibat sudah cukup jelas.

c) Wewenang

Untuk pelaksanaan program ini, wewenang sudah diberikan secara penuh kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat melalui semua Kepala Bidang dan perwakilan dimasing-masing bidang di lingkungan Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam pelaksanaan program ini, semua kewenangan juga melibatkan para petugas inseminator lapangan, aparat penegak hukum. Dengan demikian bilamana terjadi pelanggaran dengan cepat mengetahui informasi secara valid.

Sebagaimana opini Kepala Bidang Prasarana dan Sarana saat diwawancarai yakni:

Menurutnya kewenangan dan tanggung jawab mengenai Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak hanya melibatkan hanya dari internal instansi sebagai pemilik program, akan tetapi perlu adanya penyerahan pembagian wewenang dan kerjasama dengan semua pihak yang terlibat misalnya para pelaksana lapangan yang sudah tentu lebih mendalami berbagai aspek dan pengalaman yang mereka temui berhubungan dengan kebijakan ini. Sehingga mempermudah dalam proses tercapainya harapan dari program tersebut. Serta semua lembaga yang juga memiliki hubungan kesamaan pada bagian program kebijakan yang dilakukan, juga ikut dilibatkan guna membentuk kesatuan yang solid dalam menghadapi berbagai kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi di lapangan.

Pentingnya sebuah koordinasi antar semua lembaga yang terlibat dalam kebijakan ini tentu akan berengaruh positif terhadap program yang dilakukan secara perlahan dan bertahap. Apalagi kebijakan ini sangat penting karena menyangkut beberapa aspek yakni aspek pelayanan kepada masyarakat/konsumen akan kebutuhan hasil pangan berupa produk hasil peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat berupa daging ternak sapi potong yang aman, sehat, utuh dan halal. Kita berharap agar kedepan program ini akan menjadi lebih baik dan mengalami peningkatan disetiap tahun, karena bagaimanapun peran pemerintah dalam mendukung kebijakan ini sangat penting dalam menggerakan kebijakan perihal Implementasi kebijakan pemotongan ternak di rumah potong hewan dan pengendalian pemotongan betina produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4.7. Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Sumber Daya.

No	INDIKATOR	HASIL ANALISIS	FAKTOR PENYEBAB
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Secara jumlah dan mutu, sumber daya manusia yang ada sudah cukup namun perlu ditingkatkan lagi.	Pada pelaksanaan implementasi program ini jumlah staf yang tersedia sudah cukup namun perlu adanya penambahan guna memaksimalkan kinerja yang ada. Sedangkan untuk kegiatan evaluasi di tiap kegiatan masih belum optimal dan kurang sering dilakukan sehingga perlu adanya tinjauan ulang mengenai hal ini.
2	Informasi	Sudah cukup relevan, pelaksana program sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan pelaksanaan berdasarkan peraturan yang telah dibuat.	Pelaksana sudah mengetahui informasi perihal Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan pada amanat melalui Kementerian Pertanian Undang-Undang No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Wewenang	Kewenangan sudah diberikan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat melalui seluruh Kepala Bidang yang dan Kepala Seksi beserta perangkatnya yang dipilih yang berada di lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.	Telah menerima pelimpahan wewenang dari tingkat pusat maupun provinsi untuk dapat melaksanakan Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Sumber : Data Primer diolah, 2017

F . Sikap (Dispositions/Attitude)

1. Sikap Implementator

Komitmen pelaksana kebijakan program sangat diperlukan pada suatu implementasi kebijakan. Apabila pelaksana program tidak sungguh-sungguh atau merasa bertolak belakang dengan pembuat programnya, maka program tersebut tidak akan sesuai dan berhasil dengan tujuan yang telah diinginkan.

Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan program yang baik bagi peternak dalam rangka peningkatan populasi guna pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri dan memperoleh kualitas daging sapi potong aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat mendukung Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin, meskipun dukungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat relatif belum optimal dari segi dana, mengingat Dinas **Peternakan dan Kesehatan Baru Berdiri**.

Namun perlu digaris bawahi bahwa, yang terpenting adalah pemerintah daerah telah mendukung akan kebijakan ini sehingga bagi semua pelaksana yang terlibat langsung dalam kebijakan dan program ini tidak ada kejanggalan baik yang bersifat administratif maupun teknis dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana:

Ya, kita berkomitmen untuk mensukseskan Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan

Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin dengan merujuk pada amanat Kementerian Pertanian lewat Direktorat Jenderal Peternakan UU No.41 Tahun 2014 pola perihal peternakan dan kesehatan hewan dan juga standar operasional prosedur meskipun masih dalam proses penyelesaian oleh pemerintahan daerah. Melalui kontroling dan tinjauan langsung dilapangan secara terjadwal dengan berkoordinasi kepada lembaga dan instansi terkait kebijakan ini diharapkan memberikan kontribusi maksimal terhadap kemajuan kegiatan program ini sesuai dengan kewenangan kami.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat mendukung dengan adanya Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Program dalam rangka peningkatan populasi dan produktifitas ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat dan terciptanya produk hasil ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Hal ini sesuai dengan pendapat Kepala Seksi Pengembangan Bibit Ternak

Kami selaku kepala seksi sangat berkomitmen untuk mensukseskan Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat, apalagi program ini berguna untuk mendongkrak populasi ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat yang selama ini kita ketahui bersama kalau kita hanya mampu 30 % saja memenuhi kebutuhan daging kita, dan sisanya berasal dari luar daerah.. Program ini juga berguna untuk memberikan nilai edukasi dan penyadaran bagi peternak meminimalisir kebiasaan peternak untuk tidak memotong daging diluar Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah pasti belum dijamin dari segi aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

2. Dukungan Pimpinan

Berdasarkan pengamatan peneliti dilokasi penelitian, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat mendukung dengan adanya Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan terkait penyelamatan betina produktif dibantu oleh aparat penegak hukum bersama-sama melaksanakan aksi razia kepada para peternak

dan pengusaha ternak sapi potong di kecamatan arut selatan pada bulan Mei 2017 sampai dengan juni 2017. Hasil razia ditemukan beberapa pengusaha ternak yang melakukan kegiatan pemotongan secara mandiri dan pada akhirnya saat di temui dilokasi mereka langsung ditindak dan diberikan peringatan dengan penandatanganan surat pernyataan untuk tidak mengulangi kegiatan yang melanggar aturan tersebut. Hal ini dilakukan agar masyarakat terkait untuk sadar dan bersama dalam mendukung kebijakan ini agar kualitas hasil ternak benar-benar aman untuk di konsumsi.

Tanggapan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ketika diwawancarai perihal dukungan akan kebijakan ini:

Saya selaku barisan terdepan dalam kebijakan ini sangat berterimakasih atas lahirnya kebijakan yang mendukung pada sub sektor pemuliaan ternak dan menuju kesejahteraan peternak pada akhirnya terkait makna dari kebijakan ini menurut pendapat saya pribadi. Mengingat Kabupaten kita merupakan daerah dengan populasi sapi potong terbesar se Kalimantan Tengah dengan segenap harapan dan usaha kita bersama-sama mendukung secara penuh dan senantiyasa solid dalam pencapaian akan kebijakan ini. Sehingga pada akhirnya peternak merasa benar-benar merasa nyaman, aman dan maju dan pelaku usaha ternak juga memperoleh dampak yang positif pula dari kebijakan ini.

Selain itu, dalam kegiatan lain yang mencontohkan betapa pemerintah daerah mendukung akan kebijakan ini pada tanggal 22 Juni 2017 Kepala Daerah Ibu HJ. Nurhidayah, SH. MH bersama jajarannya juga ikut terjun ke lokasi Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Kotawaringin Barat untuk turut serta mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait dan memberikan dukungan agar program ini secara bersama-sama harus terus dilakukan, terkoordinasi dengan baik dengan

lemaga terkait lainnya, agar terwujudnya pembangunan peternakan di Kabupaten Kotawaringin menjadi lebih maju dibandingkan daerah yang lain.

g. Transparansi

Selain adanya sikap/disposisi dan dukungan dari pemerintah, dalam pelaksanaan program ini juga diperlukan adanya suatu transparansi dari pelaksana Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat guna menghindari terjadinya penyimpangan yang terjadi baik sebelum, saat pelaksanaan, maupun pada hasil akhir ini, sehingga tujuan yang akan diperoleh sebelumnya dapat dicapai secara maksimal. Transparansi dapat ditunjukkan salah satunya dengan membuat laporan tertulis dan foto-foto perkembangan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan dilapangan serta jumlah dana yang telah digunakan dan akan digunakan untuk penyelesaian kegiatan dilapangan.

Para pelaksana secara umum telah melaksanakan program dengan cukup transparan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan, menyatakan :

bahwa pelaksanaan Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat benar-benar transparan, keseluruhan kegiatan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan awal, laporan perkembangan dan laporan akhir kegiatan pelaksanaan program serta di evaluasi kembali.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan:

Kami seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesyehatan Hewan selaku pelaksana Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah terstruktur dari segi Administrasi berupa pembuatan laporan ditiap kegiatan dan diteruskan

kepada Dinas Provinsi sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, sehingga baik pada awal program, pelaksanaan maupun akhir program ini tidak ada celah yang kami tutup-tutupi. Kami transparan bukan tanpa sebab, karena banyaknya pengawasan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan dan penyelesaian program Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga transparansi mutlak diperlukan dalam pelaksanaan program ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pelaksana program Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat, kami selaku Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun Diluar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Aparat Penegak Hukum serta masyarakat terkait mengenai kebijakan ini. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah beserta masyarakat dapat menerima dengan cukup baik Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut baik itu dari segi dukungan pimpinan, sikap/disposisi dan transparansi . Pendapat yang dikemukakan oleh masing-masing informan sangat mendukung dengan adanya Program Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah dilakukan bersama. Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak mengemukakan bahwa sangat menerima adanya program ini dikarenakan berkaitan dengan kondisi pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya ketersediaan daging yang hanya 30% mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga perlu adanya peningkatan kinerja oleh semua

pihak yang terlibat dan penambahan personil perlu dilakukan sehingga SDM semakin meningkat, guna membantu dalam suksesnya kebijakan ini.

Selain itu menurut Kepala Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan menambahkan, kita selaku pelaksana harus benar-benar serius dalam pelaksanaan kebijakan ini karena sudah jelas bahwa kita diamanatkan sepenuhnya oleh Pemerintah daerah dan Kementerian dalam melaksanakan kebijakan ini jangan sampai kita lengah, lemah dan tetap bersatu padu dalam menghadapi resiko yang akan kita hadapi dilapangan tertama kesiapan mental. Meskipun disadari masih adanya kekurangan seperti terbatasnya ketersediaan anggaran dikarenakan kita Dinas baru, namun dengan adanya keterlibatan instansi lain hal tersebut menjadi lebih ringan. Diharapkan tahun 2018 akan datang melalui dana dari APBD yang sudah mencukupi pelaksanaan ini akan jauh lebih maksimal.

Dari pendapat yang disampaikan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak ada opini yang menyatakan untuk menolak dengan adanya Program Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah dibuat oleh pemerintah untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak dan terciptannya kualitas daging aman, sehat, utuh dan Halal serta bersama berkomitmen mensukseskan program Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Tabel 4.8. Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Sikap (Disposisi).

No	INDIKATOR	HASIL ANALISIS	FAKTOR PENYEBAB
1	Sikap Impelementor terhadap kebijakan	Pelaksana mendukung kebijakan Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat.	Pelaksana memiliki pandangan yang sama dengan pembuat kebijakan tersebut.
2	Dukungan Pimpinan	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mendukung dengan adanya Program Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat.	Masih adanya pelanggaran terkait kebijakan yang telah ditetapkan dari Kementerian Pusat, seperti pemotongan betina produktif dan pemotongan diluar RPH oleh pelaku usaha dan peternak masih terjadi.
3	Transparansi	Program kegiatan dilakukan secara transparan, dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan di tiap jadwal kegiatan dan dievaluasi setelah kegiatan.	Karena dipertanggungjawabkan secara tertulis. Laporan yang disampaikan dalam bentuk laporan ke Provinsi dan ke Pusat (Jakarta)

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Jadi dari beberapa pendapat yang telah disampaikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa komitmen untuk mensukseskan Program Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat ini sangat besar dari pihak-pihak yang terlibat karena program ini sangat baik dalam rangka

meningkatkan populasi dan produktivitas ternak sapi di Kabupaten Kotawaringin Barat dan terciptanya daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

h. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan, hal ini disebabkan struktur birokrasi mendeskripsikan bagaimana kaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam lingkungan birokrasi itu sendiri. Arah hubungan, garis komando dan pola koordinasi antar unit kerja dalam koordinasi menggambarkan adanya suatu struktur birokrasi.

Menurut Teori Edwards III menyatakan bahwa ada 2 karakteristik utama dari struktur birokrasi, yang salah satunya adalah prosedur-prosedur kerja atau *Standart Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

1. Ketersediaan SOP (*Standart Operating Procedures*)

Peneliti mengamati terhadap program Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat, unit organisasi pelaksana program yang dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini diakui oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Medik Veteriner yakni;

Sebagai Kepala Bidang dalam program Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Nomor: UKP.1220/328/FV/2017 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Kotawaringin Barat dan mengacu pada amanat UU No. 41 Tahun 2014 oleh Kementerian Pertanian melalui Ditektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang peternakan dan kesehatan hewan.

2. Fragmentasi

Menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Medik Veteriner bahwa:

Penanggung jawab kegiatan Program Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan pelaksana kegiatan adalah semua kepala bidang dan perwakilan kepala seksi dan staff yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama, aparat penegak hukum juga ikut dilibatkan dalam pelaksanaan ini serta para petugas inseminator lapangan dan instansi lain yang terkait kebijakan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari struktur organisasi sudah mendukung adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Rumah Potong Hewan sedangkan untuk Penyelamatan Betina Produktif belum ada dan tetap mengacu pada amanat UU No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan sudah pada prosedur yang seharusnya.

Dalam melaksanakan Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku penanggung jawab program tersebut dalam menghadapi permasalahan dilapangan tidak hanya melibatkan personil internal saja, melainkan juga melibatkan instansi lain seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pasar hingga Aparat Penegak Hukum yakni kepolisian guna menindaklanjuti para pelaku yang melanggar program dan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Jika dilihat dari segi keefektifan kerja, maka untuk mengelola program ini sudah cukup optimal, dikarenakan hampir melibatkan semua sektor yang melaksanakan akan kebijakan ini.

Tabel 4.9. Hasil Analisa Tahap Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Struktur Birokrasi.

No	INDIKATOR	HASIL ANALISIS	FAKTOR PENYEBAB
1	Ketersediaan SOP	Standar Operasional Prosedur bagi pelaksanaan kebijakan sudah ada untuk Standar Operasional Prosedur Rumah Potong Hewan sedangkan Pemyelamatan Betina Produktif belum ada.	Amanat UU Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (4), menyebutkan setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif.
2	Fragmentasi	Pembagian beban kerja sudah cukup baik, namun belum adanya tim khusus yang menangani pelaksanaan Program Implementasi kebijakan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat karena hanya bersifat penugasan secara umum.	Dalam Rangka Penegasan perihal penyelamatan betina produktif untuk meningkatkan populasi dan produksi daging sapi potong dan layak untuk dikonsumsi dari segi aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Dari tabel 4.9 tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan untuk unsur struktur organisasi terlihat jelas bahwa standar operasional prosedur sudah ada yang mengacu pada UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sehingga program tersebut berjalan dengan optimal.

i. Pembahasan Penelitian

Dari uraian mengenai aspek komunikasi maka dapat dijelaskan bahwa kondisi komunikasi baik dari aspek transmisi, kejelasan, konsistensi, dan koordinasi dalam kondisi baik. Hal ini sesuai dengan pendapat George C Edwards dalam Agustino (2002) bahwa pada suatu implementasi kebijakan/program, komunikasi yang baik sangat diperlukan sehingga apa yang harus dilakukan oleh implementator dapat dipahami dengan baik. Indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu (a). Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan, (b). Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan, (c). Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, (d) Koordinasi, agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik,

maka diperlukan koordinasi yang baik antara sesama pelaksana kebijakan dilapangan.

Sedangkan dari segi aspek sumberdaya, kondisi sumberdaya manusia yang ada sudah cukup optimal dalam mendukung pelaksanaan Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat ini. Hal ini dapat dilihat dari jumlah staf yang tersedia, baik dari segi mutu, latar belakang pendidikan, dan pengalaman petugas inseminator lapangan dalam mendeteksi gejala yang akan timbul sudah cukup baik namun untuk mengoptimalkan kinerja tersebut perlu menambah staf yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan kondisi informasi, wewenang dan fasilitas pada pelaksanaan program ini cukup tersedia dan mendukung. Edward dalam Agustino (2002) menyatakan bahwa Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu (a). Staf/Sumber Daya Manusia (SDM), sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Meskipun dalam jumlah staff sudah mencukupi akan lebih baik lagi bilamana adanya penambahan staf yang memiliki kompetensi tentunya kedepan dapat meringankan dan mempermudah kinerja mengenai Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat. (b). Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang

harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum yang berlaku, (c). Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara baik dan pada prosedur. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan lain, (d). Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Dari segi komitmen untuk mensukseskan Program Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, sangat besar dari pihak-pihak yang terlibat karena menganggap bahwa program ini sangat baik

untuk mereka dalam rangka meningkatkan populasi dan produktivitas ternak sapi dan terciptanya kualitas hasil ternak berupa daging sapi potong yang aman, sehat, utuh dan halal bagi konsumen/masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sesuai dengan pendapat Edward dalam Agustino (2002) yang menyatakan bahwa variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah disposisi atau sikap. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah (a). Sikap implementator, untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka diperlukan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan untuk dapat mensukseskan kebijakan tersebut, (b). Dukungan Pimpinan, hal ini sangat diperlukan dalam implementasi suatu program, apabila ada suatu dukungan yang kuat dari pimpinan maka pelaksanaan suatu program akan lebih efisien.

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan (d). Transparansi, hal ini diperlukan agar dalam pelaksanaan suatu program, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berakibat dapat mengganggu dalam melaksanakan program tersebut, mengingat program ini adalah program penting demi kemajuan peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**Tabel 4.10 Data Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH)
 Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017**

Data Pemotongan Ternak Sapi Potong Tahun 2017 Berdasarkan				
No	Bulan	Jenis Kelamian Ternak		Jumlah Pemotongan Ternak Sapi Jantan dan Betina
		Jantan	Betina Afkir/Majir	
1	Januari	41	-	41
2	Februari	31	-	31
3	Maret	31	-	31
4	April	41	-	41
5	Mei	76	1	77
6	Juni	355	5	360
7	Juli	230	-	230
8	Agustus	252	-	252
9	September	212	1	212
10	Oktober	198	-	198
11	November	207	-	207
12	Desember	246	-	246
Total		1.920	7	1.927

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.10 tersebut diatas diketahui bahwa tidak ada satupun ternak betina produktif yang tercatat terpotong pada Rumah Potong Hewan di Kabupaten Kotawaringin Barat terkecuali ternak betina yang sudah diperiksa oleh petugas teknis/dokter hewan yang berwenang dan dinyatakan sudah tidak produktif lagi . Hal ini sejalan dengan pendapat George C. Edward III mengenai disposisi/sikap, bahwa peranan sikap yang bijaksana dalam mengkaji aturan tentang implementasi ini benar-benar serius dilaksanakan dan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat andil dalam suksesnya kebijakan ini dengan mengedepankan transparansi publik yang tentunya diteapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin mulai dari kalangan pejabat atas sampai dengan tingkat pelaksanaanya.

Tabel 4.11 Data Populasi Sapi Potong dan Produksi Daging Tahun 2017 dan Total Populasi Sapi Potong dan Produksi Daging Tahun 2016

No	Kecamatan	Populasi Sapi Potong/Kecamatan	Produksi Daging (ton) / Kecamatan
1	Arut Selatan	7.720	363.91
2	Arut Utara	407	46.96
3	P. Lada	9.949	296.83
4	P. Banteng	1.162	110.93
5	Kumai	1.120	129.24
6	Kotawaringin Lama	865	99.81
Jumlah		23.120	1.047.68
Total Populasi dan Produksi Daging Tahun 2016		17.203	772.85

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2017

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.11 tersebut diatas dijelaskan bahwa program Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dari segi populasi meningkat sebesar 74,41% dan produksi daging sebesar 73,36%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terkait kebijakan ini pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan dengan baik dan terukur dalam rangka penyelamatan dan pengendalian betina produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat, artinya pemerintah daerah beserta jajaran pelaksana dilapangan dalam menyikapi kebijakan ini sudah cukup baik dan dimengerti.

Sedangkan dari unsur struktur organisasi terlihat bahwa dalam kondisi yang masih kurang mendukung yang dikarenakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai standar operasional belum dibuat untuk standar oprasional prosedur (SOP) penyelamatan betina produktif, sedangkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) untuk Rumah Potong Hewan sudah ada, hal ini sesuai dengan pendapat Edward dalam Agustino (2002) yang menyatakan bahwa variabel keempat yang

mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya beberapa kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara menyeluruh dari berbagai aspek yang ada dengan melakukan koordinasi dengan baik kepada semua pihak yang dilibatkan guna pencapaian hasil yang lebih baik. Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi menjadi arah yang lebih baik, adalah melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja yang ada.

Guna suksesnya Implementasi Kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat maka terus melakukan koordinasi terhadap lembaga/instansi yang terkait beserta semua elemen yang dianggap terlibat dalam kebijakan ini agar bersama dapat mengatasi segala kendala kemungkinan yang akan terjadi dilapangan.

Agar program Implementasi Kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat berjalan dengan baik dan optimal, maka perlu adanya peningkatan kualitas dari segi sumber daya manusia berupa penambahan personil yang kompeten, sehingga tugas dan pelaksanaan menjadi lebih efisien lagi dan dari segi operasional juga perlu ditambah lagi.

Sedangkan untuk keberlanjutan pelaksanaan program Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya mendampingi dan menjembatani apa-apa saja kebutuhan serta kendala yang dihadapi oleh peternak, guna terciptanya solidaritas untuk pembangunan peternakan secara bersama-sama dan di tahun-tahun mendatang agar keberlanjutan pelaksanaan program ini dapat terus eksis dan berjalan sesuai dengan prosedur yang baik dan benar.

Dari berbagai pendukung terkait Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat ini yang terkandung dalam teori Edward III yang peneliti lakukan perihal variabel-variabel yang mencakup aspek komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi sudah berperan dan berfungsi dengan cukup baik.

Namun dari aspek faktor penghambat dari pelaksanaan Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat menurut peneliti saat

melakukan penelitian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi kedepan seperti faktor penunjang terkait prasarana dan sarana di Rumah Potong Hewan (RPH) yang masih perlu dilengkapi dan perlu ditambah lagi kedepan, guna memperlancar kegiatan yang berkaitan dengan Rumah Potong Hewan itu sendiri dan berkaitan dengan Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, mengingat instansi ini bergerak pada bidang pelayanan. Sehingga program ini kedepan akan menjadi lebih baik dan terukur dalam esisiensi pelaksanaannya.

Sehubungan dengan adanya pembenahan dari segi prasarana dan sarana tersebut diatas, tentunya juga harus diimbangi dengan adanya penambahan personil/ sumber daya manusia di Rumah Potong Hewan (RPH), agar tupoksi dimasing-masing tugasnya terkoordinir dengan baik dan jelas serta tidak menimbulkan kinerja ganda dalam tugas yang diemban dimasing-masing tugasnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mengacu pada penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yakni sebagai berikut:

1. Terkait Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat:

- 1) Komunikasi, dalam Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini semua lini yang terlibat akan kebijakan ini dikomunikasikan dan terkoordinasi dengan baik yakni seluruh pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan perihal mutu hasil ternak berupa daging sapi potong, para aparat penegak hukum yakni pihak kepolisian, aparatur desa setempat, para penyuluh inseminator lapangan dan asosiasi pengusaha ternak sapi potong (jagal) di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada lingkup Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 27 orang. Terdiri dari semua Kepala Bidang, perwakilan Kepala Seksi, Petugas rumah potong hewan dan

Petugas inseminator lapangan dan perlu adanya penambahan tenaga medik veteriner atau dokter hewan serta petugas teknis inseminator lapangan yang kompeten untuk bersama meringankan dalam pelaksanaan kebijakan ini.

- 3) Sikap/disposisi pelaksana, dukungan pimpinan serta transparansi pada Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah cukup terkoordinasi dengan baik perihal pelaksanaan program ini terstruktur dan optimal dilapangan.
- 4) Struktur birokrasi yang dimiliki sudah cukup mendukung dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat, dilihat dari faktor Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Pada pelaksanaan Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah ada untuk Rumah Potong Hewan sedangkan untuk penyelamatan betina produktif belum ada. Akan tetapi diperkuat dengan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (4), menyebutkan setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif. Sehingga prosedur dan arah pelaksanaan program ini sangat jelas untuk dilaksanakan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi Faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan Program Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari:

A. Faktor pendukung yang terdiri dari :

- 1) Komunikasi : Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah terkoordinasi cukup baik dari segi komunikasi yakni dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kebijakan ini seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Aparat Penegak Hukum, Asosiasi Pengusaha Ternak/Jagal dan para petugas inseminator lapangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang juga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sehingga memudahkan dalam temuan permasalahan yang ada dilapangan terkait pelanggaran yang bertentangan dengan kebijakan tersebut.
- 2) Sikap/disposisi : Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat dari aspek sikap/disposisi dari hasil wawancara menunjukkan sikap positif terhadap support akan implementasi kebijakan ini dan berkomitmen untuk mensukseskan

kegiatan tersebut guna menyadarkan, memajukan dan mensejahterakan para peternak di Kabupaten Kotawaringin Barat di masa akan datang.

3) Struktur Birokrasi : Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat terkait struktur birokrasi sudah mengacu dan didukung pada aturan sebagaimana seharusnya, yakni berpacu pada Standar Operasional Prosedur tentang pelayanan rumah potong hewan yang mengacu pada amanat UU No.41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan adanya gedung RPH permanen dengan dibekali staff administrasi sesuai pada bidangnya. Sehingga tidak terdapat keraguan dalam pelaksanaannya dan tanggung jawab semua pelaksana yang terlibat dalam kebijakan ini.

4) Sumberdaya : Implementasi Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat dari aspek sumber daya manusia cukup bervariasi dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan minimal SMA sampai dengan Pasca Sarjana dalam pelaksanaannya tentu akan memudahkan dalam sistem penyampaian informasi ke berbagai lini yang terlibat dan mudah dimengerti, sebab semua petugas dan pelaksana memiliki pendidikan yang cukup.

B. Faktor penghambat

Perlu adanya penambahan staff/karyawan dengan sumberdaya manusia yang cukup dan mampu melaksanakan tanggung jawab maupun tugas yang diberikan dengan maksimal serta adanya tambahan petugas

inseminator lapangan, mengingat ruang lingkup dari kebijakan ini sangat luas serta perlengkapan alat di rumah potong hewan juga perlu ditingkatkan, mengingat semakin meningkatnya pemotongan ternak sapi potong disetiap tahunnya. Terpenting perlu adanya peningkatan mutu prasarana dan sarana, mengingat sejauh ini kelengkapan prasarana dan sarana di RPH masih kurang lengkap.

B. Saran

Dari kesimpulan yang ada maka terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Keberlanjutan dan Konsistensi Program Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat terus eksis dan berjalan. Dengan tetap melibatkan beberapa instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pasar, dan Aparat Penagak Hukum serta Aparatur Desa. Bila perlu sinergikan kebijakan ini dengan peraturan yang memiliki visi dan misi program ini dengan program instansi lain yang masih ada keterkaitan dengan Instansi lain seperti Dinas Pasar dalam meningkatkan kualitas produk dipasar agar masyarakat merasa aman dalam memperoleh daging yang beredar dipasaran.
2. Jumlah dan Kualitas Sumber daya manusia pada pelaksanaan program ini perlu ditingkatkan supaya pelaksanaan Program Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengendalian

Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat di tahun berikutnya memperoleh hasil yang maksimal. Ketersediaan personel dapat dipenuhi dengan merekrut pegawai baru ataupun dengan menambah tenaga medik veteriner atau dokter hewan dan tenaga teknis insemantor swadaya mandiri dan pelatihan-pelatihan teknis untuk semua personil yang terlibat dalam mensupport Implementasi kebijakan Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab.S. 1997. *Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. UNM Press Malang.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan publik*. Alfabeta. Bandung.
- Badjuri, Abdulkahar. dan Yuwono, Teguh, 2002. "*Kebijakan Publik : Konsep & Startegi*". Semarang, JIP UNDIK.
- BPS, 2014. *Profil Kabupaten : Kobar dalam Angka* Pangkalan Bun.
- Dunn, N William. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (terjemahan) Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. (1980), *Implementing Public Policy, congressional Quarterly Press, Washington*.
- Howlett, Michael and M. Ramesh, 1995. "*Studying Public Policy; Policy Cycles and Policy Subsystems* " Oxford, Oxford University Press.
- Istianda, Meita. 2015. *Studi Mandiri*. Universitas Terbuka. Jakarta
- Kompas, 7 Desember 2014
- Laporan Dinas Pertanian dan Peternakan 2014. Statistik Ternak Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Laporan Ketahanan Pangan Daerah 2015 Kotawaringin Barat Ketersediaan Pangan Protein Hewani Kabupaten Kotawaringin Barat
- Miles and Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya. Bandung
- Mustopadidjaja, A.R 1984. *Manajemen Proses Kebijakan*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.
- Nurani, D 2009. *Analisis Implementasi Penggunaan Dana BOS pada Pamda DKI Jakarta*. Jurnal Fisip UI.
- Permentan No. 72 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pelayanan Sektor Pertanian.
- PSPK. 2011. Rilis Akhir Hasil Sensus Ternak Tahun 2011. Kementan - BPS, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Quade, Steward S, 1982. *"Anailysis for Public Decisions*. New York elsevior Science Publishing Company.

Suwitri, 2010. *"Anailisis Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Toelihere, M. R. 1981a. *Fisiologi Reproduksi pada Ternak*. Angkasa. Bandung.1981b. *Inseminasi Buatan pada Ternak*. Bandung: Angkasa.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.



LAMPIRAN 1

KUISIONER PENELITIAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara Penelitian

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMOTONGAN TERNAK DI RUMAH POTONG HEWAN DAN PELARANGAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Nama Mahasiswa : Anwar
No Mahasiswa : 500878235
Program Studi : Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka
Nama Informan : Kepala Bidang

1. Apakah pemerintah sudah memberikan informasi/sosialisasi mengenai Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif? jika sudah, jelaskan melalui apa program - program tersebut diberikan.
2. Apakah menurut Saudara Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif dapat Meningkatkan Populasi Ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Selain Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, apakah ada dinas/ instansi/ lembaga lain yang terkait dalam Pelaksanaan Kebijakan tersebut?
4. Bagaimana koordinasi antar dinas/ instansi/ lembaga lain yang terkait dengan Kebijakan ini?
5. Apakah dari segi kuantitas dan kualitas, SDM pelaksana dari Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat, sudah mencukupi?
6. Apakah Sarana dan Prasarana pelaksanaan kegiatan Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di kabupaten Kotawaringin Barat sudah mencukupi.
7. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing- masing pelaksana baik dari tingkat lapangan maupun di RPH
8. Apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan yang ada.
9. Bagaimana tanggapan Saudara dengan adanya Kegiatan Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat?
10. Bagaimana dukungan Pemerintah Kabupaten terhadap Kegiatan Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat?
11. Apakah unit organisasi pelaksana kegiatan Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat ini memiliki SOP yang jelas, jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada?

12. Apakah ada seksi khusus atau bagian yang mengurus Kebijakan tersebut?
13. Apakah Saudara memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan Kebijakan tersebut? Jika ya, jelaskan dengan apa komitmen tersebut ditunjukkan.
14. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing- masing pelaksana? Jika sudah ada, apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan yang ada.
15. Menurut Saudara apa upaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengimplementasikan Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat? Bagaimana strategi agar masyarakat mau melaksanakan kebijakan tersebut?
16. Apakah target Saudara sebagai kepala bidang tentang Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat ini?
17. Apa upaya saudara sebagai kepala bidang untuk melaksanakan kebijakan ini dan bagaimana untuk dapat mengawal keberlanjutan kebijakan ini?



Pedoman Wawancara Penelitian

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMOTONGAN TERNAK DI RUMAH POTONG HEWAN DAN PELARANGAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Nama Mahasiswa : Anwar

No Mahasiswa : 500878235

Program Studi : Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka

Nama Informan : Kepala Seksi

1. Apakah Saudara mengetahui Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat? Jika ya, kapan dan dari mana Saudara mengetahuinya?
2. Apakah Saudara tahu apa tujuan dan sasaran kebijakan tersebut?
3. Apakah ada koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan kebijakan tersebut?
4. Menurut Saudara apakah fasilitas/ sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup dan memadai?
5. Bagaimana tanggapan dari instansi Saudara dengan adanya Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?
6. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai kebijakan tersebut?
7. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk ikut mensukseskan kebijakan tersebut?
8. Menurut Saudara apakah kebijakan ini baik untuk dilaksanakan?
9. Bagaimana dengan petugas pelaksana di Rumah Potong Hewan, apakah dari kuantitas dan kualitas sudah memadai?
10. Apakah target Saudara sebagai kepala seksi tentang kebijakan tersebut
11. Apa upaya saudara sebagai kepala seksi untuk mengoptimalkan Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat yang baru dilaksanakan ini?

Pedoman Wawancara Penelitian

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMOTONGAN TERNAK
DI RUMAH POTONG HEWAN DAN PELARANGAN
PEMOTONGAN BETINA PRODUKSTIF DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT.
Nama Mahasiswa : Anwar
No Mahasiswa : 500878235
Program Studi : Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka
Nama Informan : Petugas Lapang

1. Apakah Saudara mengetahui Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat? Jika ya, kapan dan darimana mengetahuinya?
2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Peningkatan populasi ternak dalam rangka pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?
3. Apakah Saudara mendukung dan apa tanggapan instansi saudara dengan adanya kebijakan ini?
4. Bagaimana pemahaman Saudara mengenai Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat?
5. Menurut Saudara apakah kebijakan ini baik untuk dilaksanakan?
6. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat?
7. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan?
8. Apakah target Saudara tentang Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat ini
9. Apa upaya saudara sebagai Petugas Lapang untuk mengoptimalkan Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat ini?
10. Bagaimana saudara sebagai Petugas Lapang untuk dapat mengawal dan membantu petani dalam keberlanjutan kebijakan ini?

Pedoman Wawancara Penelitian

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMOTONGAN TERNAK
DI RUMAH POTONG HEWAN DAN PELARANGAN
PEMOTONGAN BETINA PRODUKSTIF DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT.
Nama Mahasiswa : Anwar
No Mahasiswa : 500878235
Program Studi : Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka
Nama Informan : Petugas Rumah Potong Hewan

1. Apakah Saudara mengetahui Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat? Jika ya, kapan dan darimana mengetahuinya?
2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat?
3. Apakah Saudara mendukung dan apa tanggapan instansi saudara dengan adanya kebijakan ini?
4. Bagaimana pemahaman Saudara mengenai Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat?
5. Menurut Saudara apakah kebijakan ini baik untuk dilaksanakan?
6. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat?
7. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan?
8. Apakah target Saudara tentang Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat ini
9. Apa upaya saudara sebagai Petugas Rumah Potong Hewan untuk mengoptimalkan Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat ini?
10. Bagaimana saudara sebagai Petugas Rumah Potong Hewan untuk dapat mengawal dan membantu petani dalam keberlanjutan kebijakan ini?

Pedoman Wawancara Penelitian

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMOTONGAN TERNAK DI RUMAH POTONG HEWAN DAN PELARANGAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKSTIF DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
Nama Mahasiswa : Anwar
No Mahasiswa : 500878235
Program Studi : Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka
Nama Informan : Pelaku Usaha Pemotongan Ternak

1. Apakah Saudara mengetahui Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat? Jika ya, kapan dan darimana mengetahuinya?
2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat?
3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi kebijakan Pemotongan Ternak di RPH dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif
4. Apakah saudara mendukung dan apa tanggapan saudara dengan adanya kebijakan ini?
5. Bagaimana pemahaman Saudara mengenai Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat?
6. Menurut Saudara apakah kebijakan ini baik untuk dilaksanakan?
7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan Kebijakan Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan dan Pelarangan Pemotongan Betina Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat?
8. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan?
9. Bagaimana saudara sebagai Pelaku Usaha Pemotongan Ternak untuk dapat melaksanakan kebijakan ini
10. Bagaimana menurut saudara sebagai Pelaku Usaha Pemotongan Ternak tentang pelaksanaan kebijakan ini?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Sahweri selaku pelaku usaha pemotongan ternak sapi/ jagal



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku pelaku usaha pemotongan ternak sapi/ jagal



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Jasri selaku pelaku usaha pemotongan ternak sapi/ jagal



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Iwan Sutrisno
Selaku Kasi Perbibitan Ternak



Gambar 5. Wawancara dengan Saudari Dina
Selaku Peugas Rumah Potong Hewan



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Hj. Risanty
Selaku Kabid Perbibitan dan Produksi Ternak



Gambar 7. Sidak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Ke Rumah Potong Hewan



Gambar 8. Sidak Kepala Dinas di Dampingi Kabid SDM dan Kabid Kesmavet di Rumah Potong Hewan



Gambar 9. Sidak Aparat Penegak Hukum/Kepolisian Dalam Rangka Pengendalian Pematangan Ternak diluar RPH



Gambar 10. Sosialisasi Pemasangan Spanduk Perihal Pemotongan Ternak di RPH dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif di Pasar Tradisional Kecamatan Kumai



Gambar 11. Sosialisasi Pemasangan Spanduk Perihal Pemotongan Ternak di RPH dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif di Desa Kadipi Atas Kec. Pangkalan Lada



Gambar 12. Sosialisasi Pemasangan Spanduk Perihal Pemotongan Ternak di RPH dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif di Desa Riam Durian Kec. Pangkalan Lada



Gambar 13. Pemeriksaan Indukan Sapi Betina Produktif di Desa Palih Baru Kecamatan Kolan



Gambar 14. Pemeriksaan Indukan Sapi Betina Produktif di Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan



Gambar 15. Pemeriksaan Indukan Sapi Betina Produktif di Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada



Gambar 16. Sosialisasi Forum Group Discussion Perihal Pemotongan Ternak di RPH dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif di Aula Dinas PKH



Gambar 17. Sosialisasi Perihal Pemotongan Ternak di RPH dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif di Aula Dinas PKH Bersama Asosiasi Peternak



Gambar 18. Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Perihal Pemotongan Ternak di RPH dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif di Aula Dinas PKH Bersama Asosiasi Pengusaha Ternak